KEMENTERIAN HUKUM
KANTOR WILAYAH
KALIMANTAN SELATAN

#bangga melayani bangsa

KEMENKUM KALSEL NEWS

BULETIN

MINGGU KE-3 MEI 2025

DISKUSI BERSAMA NOTARIS WILAYAH TANJUNG - BALANGAN

PENANDATANGANAN MoU DAN PKS DPRD TAPIN

PENGUATAN PEMBANGUNAN ZI

KANWIL KEMENKUM KALIMANTAN SELATAN

- DIVISI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM
- DIVISI PELAYANAN HUKUM
- BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM

Terhubung lebih dekat: kemenkumkalsel @kemenkumkalsel kalsel.kemenkum.go.id

Pendaftaran Merek di Indonesia Paling Lama 6 Bulan, Lebih Cepat dari Amerika dan Cina

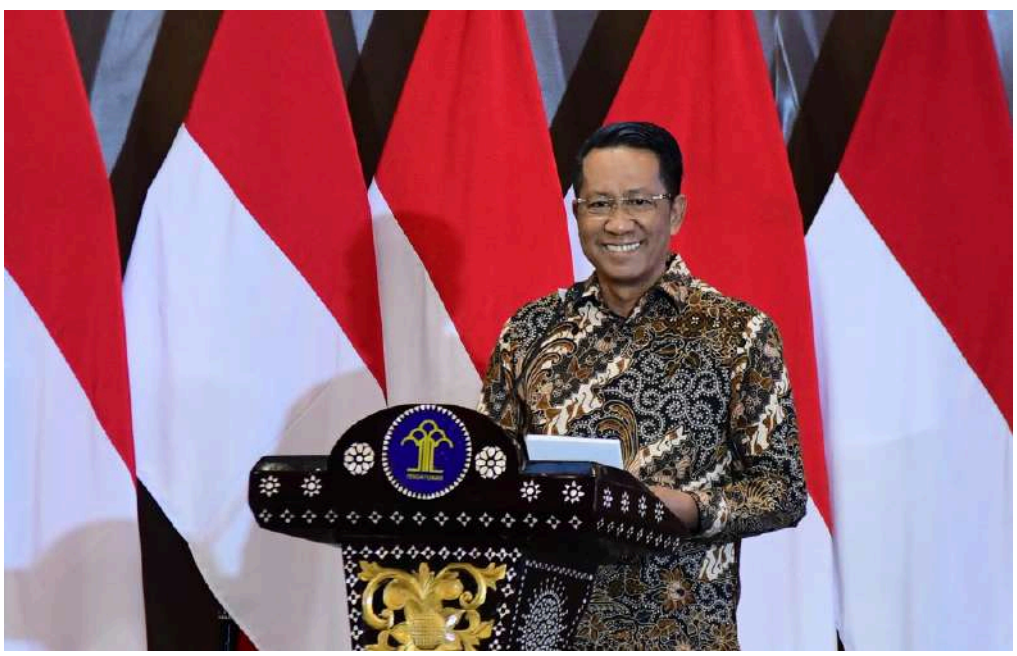

Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) menetapkan jangka waktu pendaftaran merek di Indonesia paling lama enam bulan. Tenggang waktu pendaftaran ini lebih cepat dari Amerika di 12,7 bulan dan Cina di 12-15 bulan.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mengatakan saat ini tidak ada lagi tunggakan pendaftaran merek dan Kemenkum telah memenuhi target waktu pelayanan maksimal enam bulan, sehingga Indonesia tidak ketinggalan dari negara-negara maju lain seperti Amerika, Cina, Singapura, Jepang, dan Korea Selatan.

“Indonesia telah sejajar dengan negara-negara maju lainnya dalam hal waktu pendaftaran merek. Amerika dan Cina sekitar 12 bulan, Korsel 7 bulan, Jepang 4-7 bulan, dan Singapura sekitar 9 bulan,” ungkap Supratman, Minggu (18/5/2025).

Selain jangka waktu, biaya pendaftaran merek di Indonesia juga lebih murah dibandingkan negara-negara tersebut. Indonesia menarifkan Rp1,8 juta untuk pendaftar umum dan Rp500 ribu bagi UMKM. Biaya ini jauh di bawah Amerika yang memasang tarif Rp8,2 juta, Jepang Rp4,7 juta, Singapura Rp4,6 juta, Cina, Rp4,4 juta, dan Korsel di angka Rp2,3 juta. Supratman mengatakan penetapan jangka waktu dan biaya pendaftaran merek yang terjangkau menjadi motivasi bagi masyarakat dan UMKM untuk segera memberikan perlindungan hukum bagi karya mereka. Di triwulan I tahun 2025 saja, Kemenkum mencatatkan 29.773 pendaftaran merek.

“Masyarakat mendapatkan kepastian hukum, bahwa maksimal enam bulan dengan biaya yang jelas. Kami berkomitmen memberikan pelayanan merek yang cepat dan terjangkau bagi masyarakat. Saya mengajak semua insan kreatif agar terus berkarya dan berinovasi, tetapi jangan lupa untuk melindungi karyanya,” ucapnya.

Menteri penggemar sepak bola ini menjelaskan bahwa Kemenkum telah melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam pelayanan agar bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satunya adalah transformasi digital yang telah dicanangkan sejak ia menjabat sebagai Menteri Hukum. Menurutnya, pelayanan publik berbasis digital akan memudahkan akses masyarakat, mempercepat proses pelayanan, dan meningkatkan transparansi pelayanan. Di bidang pendaftaran merek sendiri, Kemenkum telah melakukan penyesuaian pola kerja pemeriksa merek dengan sistem flexible working arrangement yang memberikan fleksibilitas waktu dan tempat kerja bagi pegawai. Pola kerja ini mencatatkan tren positif dengan terselesaikannya seluruh tunggakan merek sehingga saat ini sudah tidak ada lagi tunggakan.

“Pemanfaatan teknologi digital memberikan pengaruh yang sangat besar dalam keseluruhan layanan di Kemenkum, termasuk pendaftaran merek. Proses layanan menjadi lebih mudah, dan masyarakat bisa mengakses layanan dari jarak jauh. Hal ini meningkatkan tingkat kepercayaan publik kepada Kemenkum,” ujar Supratman.

Secara terpisah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti menyambut baik kebijakan strategis Kementerian Hukum RI dalam percepatan pendaftaran merek yang kini maksimal hanya enam bulan. “Langkah ini menunjukkan komitmen negara dalam memberikan kepastian hukum dan pelayanan publik yang semakin cepat, murah, dan efisien. Ini adalah bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap pelaku usaha, khususnya UMKM, agar mereka memiliki perlindungan hukum atas kekayaan intelektualnya,” ucapnya.

Apel Pagi Awali Pekan dengan Semangat Penguatan Zona Integritas di Kanwil Kemenkum Kalsel

Banjarmasin, Humas_Info – Senin (19/5/2025), Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Kalimantan Selatan menggelar apel pagi rutin yang dilaksanakan di halaman kantor wilayah. Apel pagi kali ini dipimpin oleh Analis Hukum Muda, Eldy Prasetya, dengan Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Riswandi, bertindak sebagai pembina apel.

Dalam amanatnya, Riswandi menyampaikan tiga poin penting kepada seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Kalsel. Pertama, ia mengingatkan bahwa hari ini seluruh pegawai akan mengikuti pengarahan dari Kepala Kantor Wilayah terkait penguatan Pembangunan Zona Integritas (ZI). Ia menekankan pentingnya komitmen bersama dalam menjaga semangat integritas dan pelayanan publik yang prima.

“Kita harus bersama-sama dalam melaksanakan tugas, tidak hanya fokus pada bidang masing-masing namun menjadi satu kesatuan yang solid sebagai Kanwil Kemenkum Kalsel,” ujarnya.

Lebih lanjut, Riswandi juga mengajak seluruh jajaran untuk memberikan dukungan terhadap aransemen mars Kekayaan Intelektual Kalimantan Selatan, sebagai bentuk penguatan identitas dan semangat kerja di bidang pelayanan KI.

Apel pagi ini turut dihadiri oleh pimpinan tinggi pratama, pejabat manajerial, pejabat non-manajerial, serta seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Kalsel. Kehadiran penuh dari seluruh elemen organisasi menunjukkan kesiapan dan keseriusan Kanwil dalam menyongsong agenda penguatan Zona Integritas di lingkungan kerja.

Penguatan ZI di Kanwil Kemenkum Kalsel, Kakanwil Tegaskan Peran Kolektif Pegawai untuk Raih WBK

Banjarmasin, Humas_Info – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti memimpin kegiatan Penguatan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang digelar pada Senin, 19 Mei 2025, di Balai Pertemuan Garuda Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel.

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pembangunan ZI serta pegawai Kantor Wilayah. Hadir dalam kegiatan ini jajaran pimpinan tinggi pratama, yaitu Kepala Divisi Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Anton Edward Wardhana, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Meidy Firmansyah, dan Sekretaris Tim Pembangunan ZI, Eko Sulistiyono.

Dalam pembukaan kegiatan, Anton Edward Wardhana selaku Ketua Pembangunan ZI menyampaikan bahwa proses pembangunan ZI di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalsel masih terus berjalan. Ia menekankan pentingnya menjaga integritas dan saling mengingatkan, membantu, serta mengawal setiap progres yang telah dilakukan.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Nuryanti Widyastuti dalam arahannya mengingatkan seluruh pegawai bahwa pembangunan ZI telah melalui tahap penilaian oleh Tim Penilai Internal dari Inspektorat Jenderal, dan hasilnya kini tengah dibawa ke Panel Evaluasi. Ia mendorong seluruh pegawai untuk terus berupaya dan berdoa, serta menjaga integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam setiap layanan yang diberikan.

“Kita harus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, tidak hanya oleh pegawai, tetapi juga perlu dukungan seluruh unsur pendukung layanan seperti PPNPN, OB, driver, security, dan helpdesk,” tegas Nuryanti.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kualitas data dukung yang telah disiapkan sebagai bagian dari komitmen dalam proses pembangunan ZI menuju WBK/WBBM.

Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua Tim Pembangunan ZI, Meidy Firmansyah mengajak seluruh jajaran untuk menjaga nama baik Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, baik di lingkungan kerja maupun di luar.

Melalui kegiatan ini, diharapkan semangat dan konsistensi seluruh pegawai dalam mewujudkan Zona Integritas di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalsel semakin meningkat.

Kemenkum Kalsel Hadiri Rapat Tim Terpadu Pengawasan Ormas di Banjarbaru

Banjarbaru, AHU_Info – Dalam rangka memperkuat pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang beroperasi di wilayah Kota Banjarbaru, telah dilaksanakan Rapat Tim Terpadu (Timdu) Pengawasan Ormas pada Jumat, 16/05/2025 bertempat di Ruang Rapat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Banjarbaru.

Rapat ini menjadi langkah awal pembentukan Satgas Terpadu Pengawasan Ormas, yang terdiri dari 13 instansi terkait, sebagai wujud sinergi lintas sektor dalam upaya menjaga stabilitas keamanan, ketertiban umum, dan iklim investasi yang kondusif di Kota Banjarbaru.

Organisasi Kemasyarakatan merupakan elemen penting dalam tatanan demokrasi. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian Ormas berpotensi menyimpang dari tujuan awal dan bahkan menjadi ancaman terhadap ketertiban masyarakat dan stabilitas daerah. Oleh sebab itu, kehadiran Satgas Terpadu ini menjadi sangat strategis sebagai respons atas kebutuhan akan sistem pengawasan dan pembinaan Ormas yang lebih terstruktur dan efektif.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, melalui Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU), turut ambil bagian dalam kegiatan ini sebagai bentuk implementasi amanat peraturan perundang-undangan. Kepala Bidang Pelayanan AHU, Dewi Woro Lestari, dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi terhadap inisiasi pembentukan tim dan menyatakan komitmen penuh Kanwil Kemenkum Kalsel dalam mendukung kegiatan pengawasan dan pembinaan ormas secara berkelanjutan.

“Pengawasan ormas harus dilakukan melalui pendekatan hukum yang humanis dan menyeluruh, agar kehadiran ormas benar-benar memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan tidak justru menimbulkan keresahan,” ungkapnya.

Dalam rapat ini, masing-masing perwakilan instansi memaparkan peran dan kontribusinya dalam struktur Tim Terpadu, menandai dimulainya proses koordinasi intensif antar instansi pemerintah. Diharapkan, Satgas ini tidak hanya menjadi forum koordinasi administratif, tetapi menjadi kekuatan konkret dalam menjaga ketertiban sosial, melindungi kepentingan umum, dan memastikan keberadaan Ormas sesuai dengan fungsi sosial dan ketentuan hukum yang berlaku.

Kemenkum Kalsel Dukung Penguatan Legalitas Organisasi Pemuda dan Pramuka di Kalsel

Banjarmasin, AHU_Info – Dalam rangka memperkuat tata kelola dan kapasitas kelembagaan organisasi kepemudaan dan kepramukaan di Kalimantan Selatan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan menggelar kegiatan Peningkatan Manajemen Kelembagaan Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan Tahun 2025, yang dilaksanakan pada Jumat (16/05) bertempat di Hotel Zuri Express Banjarmasin.

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan organisasi kepemudaan dari berbagai kabupaten/kota di Kalimantan Selatan, serta menghadirkan narasumber dari sejumlah instansi pemerintah. Salah satunya adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, yang diwakili oleh Dewi Woro Lestari, Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum.

Dalam paparannya, Dewi menjelaskan pentingnya legalitas formal bagi organisasi masyarakat, khususnya dalam bentuk badan hukum, yang diatur dalam sistem hukum nasional. Ia memaparkan unsur-unsur pendirian organisasi masyarakat (Ormas) sesuai peraturan perundang-undangan, seperti struktur kepengurusan, tujuan organisasi, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART), serta kesesuaian kegiatan dengan asas negara.

Selain itu, Dewi juga memberikan penjelasan teknis mengenai proses pendaftaran Ormas secara daring melalui AHU Online, mulai dari persyaratan dokumen, alur pendaftaran, hingga estimasi waktu penyelesaian. Ia menekankan bahwa Ormas yang memiliki badan hukum akan memperoleh berbagai manfaat, seperti kemudahan menjalin kemitraan dengan pemerintah, akses terhadap bantuan keuangan, serta peningkatan kredibilitas di mata publik.

Tak luput, ia juga mengulas tantangan yang sering dihadapi oleh Ormas yang belum berbadan hukum, termasuk kendala dalam menjalin kerja sama, rawan konflik internal, serta terbatasnya akses terhadap program-program pemerintah.

Materi ini disambut antusias oleh para peserta yang aktif mengikuti sesi tanya jawab. Mereka menyampaikan berbagai persoalan teknis dan administratif terkait pengelolaan organisasi, sekaligus mencari solusi langsung dari narasumber. Diskusi berlangsung hangat dan konstruktif, menandai semangat tinggi para pemuda untuk memperkuat organisasinya secara legal dan profesional.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan organisasi kepemudaan dan kepramukaan di Kalimantan Selatan dapat semakin berdaya, legal secara hukum, dan siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam pembangunan sosial dan kepemudaan. (Kontributor AHU, ed: Eko/Arie)

Kemenkum Kalsel Ikuti Pembukaan Panel Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM Tahun 2025

Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti kegiatan Pembukaan Panel atas Hasil Evaluasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kementerian Hukum Tahun 2025, yang digelar secara daring pada Senin, (19/05/2025) bertempat di Balai Pertemuan Garuda, Kanwil Kemenkum Kalsel.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah, Nuryanti Widyastuti, Kepala Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum selaku Ketua Pembangunan ZI Kantor Wilayah, Anton Edward Wardhana, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah, serta seluruh Kelompok Kerja (Pokja) Pembangunan ZI di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalsel. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal (TPI) terhadap satuan kerja yang diusulkan menuju predikat WBK dan WBBM.

Dalam laporannya, Sekretaris TPI sekaligus Auditor Ahli Madya Inspektorat Wilayah V, Nanih Kusnani, menjelaskan bahwa proses evaluasi dilakukan melalui dua tahap utama, yaitu desk evaluasi dan evaluasi lapangan, yang dilanjutkan dengan kegiatan panel yang dilaksanakan pada 19 hingga 23 Mei 2025. Hasil dari kegiatan ini akan dituangkan dalam berita acara, laporan, dan surat informasi panel yang akan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum. Tahun ini, terdapat 10 satuan kerja yang berhasil masuk panel untuk predikat WBK dan 16 satuan kerja untuk WBBM.

Sementara itu, Wakil Ketua TPI dan Inspektur Wilayah V, Amrizal, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan panel ini memiliki beberapa tujuan penting, antara lain:
- Memberikan masukan dan rekomendasi guna meningkatkan kualitas pembangunan ZI;
- Meningkatkan akuntabilitas satuan kerja dalam pelaksanaan pembangunan ZI;
- Mendukung keberlanjutan program pembangunan ZI di lingkungan Kementerian Hukum;
- Melakukan evaluasi terhadap kualitas pelayanan satuan kerja dalam rangka pembangunan ZI.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh satuan kerja yang mengikuti proses evaluasi dapat terus berkomitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan melayani, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang digaungkan oleh Kementerian Hukum.

Menyambut Tunas Pengayoman, Kemenkum Kalsel Ikuti Rapat Persiapan Orientasi CPNS Secara Daring

Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Kalimantan Selatan mengikuti secara daring Rapat Pembahasan Persiapan Orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2024 di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia.

Kegiatan rapat diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah, Nuryanti Widyastuti didampingi Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Rustam Sakka beserta Tim Kerja SDM Aparatur Kemenkum Kalsel dari Ruang Rapat Kakanwil, Senin (19/5/25).

Jalannya rapat dipimpin langsung oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Fajar Sulaeman Taman yang menyampaikan bahwa Kementerian Hukum akan melaksanakan pemanggilan serta orientasi terhadap 863 (delapan ratus enam puluh tiga) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2024 untuk mengikuti pelaksanaan orientasi pada tanggal 2–4 Juni 2025.

Sebanyak 863 CPNS Kementerian Hukum ini tersebar di Unit Pusat, Kantor Wilayah, dan Unit Pelaksana Teknis. Untuk di Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Selatan sendiri ada sebanyak 16 CPNS yang nantinya akan mengikuti kegiatan orientasi ini sebelum melaksanakan tugas sebagai tunas Pengayoman.

Kegiatan orientasi akan dilaksanakan pada hari pertama secara hybrid, di mana para peserta akan mendapatkan pengarahan langsung dari Menteri dan mendapat pemaparan materi dari Wakil Menteri, Sekretaris Jenderal, dan para Pimpinan Tinggi Madya lainnya seputar tugas dan fungsi Kementerian Hukum.

Agenda di wilayah, CPNS juga nantinya akan diberikan pengenalan lingkungan, organisasi, dan budaya kerja di satuan kerjanya masing-masing.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Fajar Sulaeman Taman dalam arahannya menegaskan pentingnya kegiatan orientasi ini sebagai bagian dari proses pembentukan karakter ASN Pengayoman. “Orientasi ini bukan sekadar seremonial, tetapi menjadi momen krusial untuk menanamkan nilai-nilai dasar Kementerian Hukum dan membekali para CPNS agar siap menjalankan tugas dengan profesional dan berintegritas,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Nuryanti Widyastuti menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan berbagai langkah dalam menyambut CPNS yang akan mulai bertugas di wilayah Kalimantan Selatan.

“Kami akan memastikan pembekalan sebagai bagian proses adaptasi para CPNS berjalan dengan baik. Pembekalan budaya kerja, pengenalan organisasi, dan pendampingan akan dilakukan secara terstruktur agar mereka mampu menjalankan amanah sebagai ASN Pengayoman dengan penuh integritas dan tanggung jawab,” tegas Nuryanti.

Kemenkum Kalsel Harmonisasi Rancangan Perbup RDTR Batu Ampar Tanah Laut

Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melaksanakan kegiatan harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan (WP) Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut pada Senin (19/05). Kegiatan ini dipimpin oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Eryck Yulianto, dan dihadiri oleh perwakilan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Harmonisasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa substansi dari Rancangan Perbup RDTR WP Batu Ampar telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam kerangka pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan tertib. Rancangan Perbup ini sendiri disusun dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta sebagai turunan dari Perda RTRW Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024–2043.

Dalam diskusi yang berlangsung, tim dari Kanwil Kemenkum Kalsel memberikan masukan terhadap struktur hukum, sistematika peraturan, serta ketentuan normatif dalam Rancangan Perbup tersebut, guna memastikan kejelasan dan kepastian hukum. Substansi RDTR WP Batu Ampar yang mencakup delineasi wilayah, struktur ruang, pola ruang, hingga peraturan zonasi dibahas secara mendalam.

“Melalui harmonisasi ini, kita ingin memastikan bahwa produk hukum daerah yang dihasilkan tidak hanya akurat secara substansi teknis, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang kuat dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi,” ujar Eryck Yulianto dalam arahannya.

Kegiatan ini diharapkan dapat mempercepat proses penyusunan dan penetapan RDTR WP Batu Ampar sebagai dokumen rujukan tata ruang yang terintegrasi dan responsif terhadap pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Tanah Laut.

09

19 Mei 2025

Asistensi Dokumen Deskripsi Gula Aren Tirawan Dipercepat, Hadirkan Kolaborasi Pemkab Kotabaru, Kanwil Kemenkum Kalsel dan DJKI

Banjarmasin, Humas_Info — Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum RI menggelar kegiatan asistensi percepatan penyusunan dokumen deskripsi Indikasi Geografis (IG) Gula Aren Tirawan secara daring, Senin (19/5). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas permohonan percepatan yang disampaikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan.

Dalam kegiatan tersebut, hadir perwakilan Pemerintah Kabupaten Kotabaru, Kepala Bidang Perindustrian dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Joni Fahamsyah serta dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapperida) Kotabaru, Rachmat Hidayat, Kepala Bidanf Riset. Turut hadir Tim Ahli Indikasi Geografis dari DJKI dan Tim dari Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Selatan, Riswandi beserta jajaran.

Asistensi ini bertujuan untuk mempercepat penyusunan dokumen deskripsi IG Gula Aren Tirawan yang merupakan langkah penting dalam proses pendaftaran indikasi geografis, guna melindungi dan mempromosikan produk khas daerah Tirawan, Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru.

Guna memperlancar proses pendaftaran Indikasi Geografis Gula Aren Tirawan, dilakukan pembahasan secara detil atas dokumen deskripsi yang telah disusun. Koreksi ataupun masukan diberikan oleh Tim Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, diantaranya hasil pengujian yang mencantumkan kandungan dari hasil uji sampel serta isi deskripsi yang perlu ditambahkan.

Perbaikan pun diharapkan dapat segera diselesaikan guna percepatan pendafataran Indikasi Geografis dari Kabupaten Kotabaru tersebut. Kegiatan yang digelar secara daring melalui aplikasi Zoom ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan serta mendorong percepatan perlindungan kekayaan intelektual berbasis potensi lokal di Kalimantan Selatan.

Ditjen AHU Dorong Percepatan Legalitas Koperasi Merah Putih, Fokuskan Koordinasi Pusat dan Daerah

Banjarmasin, Humas_Info – Guna mempercepat pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pembentukan Koperasi Merah Putih di tingkat desa dan kelurahan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum menyelenggarakan rapat evaluasi progres pengesahan badan hukum koperasi pada Senin (19/05).

Kegiatan ini diikuti secara daring oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti, bersama jajaran Divisi Pelayanan Hukum, termasuk Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah dan Kepala Biang Pelayanan AHU, Dewi Woro Lestari.

Dirjen AHU, Dr. Widodo, menegaskan bahwa percepatan pengesahan koperasi tidak bisa dilakukan tanpa sinergi lintas sektor. Ia menyebut seluruh proses musyawarah di desa dan kelurahan harus selesai paling lambat akhir Mei 2025, dengan target pengesahan badan hukum rampung di bulan berikutnya.

“Presiden menargetkan peluncuran 80 ribu Koperasi Merah Putih pada 12 Juni. Ini harus kita kawal bersama,” ujar Widodo dalam arahannya.

Data menunjukkan bahwa hingga pertengahan Mei, lebih dari 16 ribu koperasi telah memesan nama, namun baru sekitar 800-an yang resmi disahkan. Widodo menilai capaian ini masih jauh dari ideal dan meminta laporan kemajuan disampaikan dua kali sehari secara konsisten. Terkait hambatan teknis, ia menyoroti ketimpangan beban kerja notaris, yang dalam beberapa kasus menangani ribuan permohonan. Kondisi ini dianggap tidak efisien dan membutuhkan distribusi kerja yang lebih adil.

“Kita tidak bisa mengandalkan satu notaris untuk ribuan desa. Harus ada pembagian tugas yang masuk akal,” tegasnya.
Widodo juga menekankan pentingnya efisiensi birokrasi. Ia meminta agar semua dokumen koperasi disampaikan langsung ke notaris tanpa hambatan administratif dari dinas teknis.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti, menyatakan komitmennya untuk mendorong daerah agar turut memenuhi target yang ditetapkan pemerintah pusat.

“Kami akan memperkuat koordinasi dengan pemda dan para notaris di Kalimantan Selatan agar proses pengesahan koperasi dapat berjalan lebih cepat dan tepat waktu. Kami tidak ingin tertinggal dalam program strategis nasional ini,” ujarnya.

Menutup arahannya, Widodo menyerukan kerja sama lintas sektor yang konkret dan terkoordinasi dalam mendukung transformasi ekonomi berbasis koperasi menuju Indonesia Emas 2045.

Dorong Kolaborasi Hukum, Kanwil Kemenkum Kalsel dan Pemkab Tanah Laut Bahas Penyempurnaan Kerja Sama

Pelaihari, Humas_Info – Senin (19/5), Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti kegiatan Pembahasan Kesepakatan Bersama dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang bertempat di Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Pertemuan ini membahas kerja sama strategis di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pembinaan Hukum, Analis Kebijakan Hukum, dan Pelayanan Hukum antara kedua belah pihak. Dari Kanwil Kemenkum Kalsel, kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Anton Edward Wardana, beserta Tim.

Sementara itu, dari Pemerintah Kabupaten Tanah Laut turut hadir Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Hairul Rijal; Kabag Pemerintahan Setda Tanah Laut, Sahri.

Dalam pengantarnya, Anton Edward Wardana menegaskan pentingnya mencermati kembali draf perjanjian kerja sama (PKS) yang telah disusun.

"Kami mendorong agar seluruh pihak memperhatikan secara seksama apabila terdapat hal-hal yang belum terakomodir dalam rancangan ini," ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa pembaruan kerja sama ini menyesuaikan dengan perubahan nomenklatur dari Kementerian Hukum dan HAM menjadi Kementerian Hukum.

Menanggapi hal tersebut, Hairul Rijal menyampaikan kesiapan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk menjalin sinergi yang lebih erat.

"Kami selalu membuka diri untuk bekerja sama, terutama demi kemajuan Tanah Laut. Selama ini, kami telah bersinergi dengan Kementerian Hukum dalam banyak hal, salah satunya dalam pembentukan Peraturan Daerah," ucapnya.

Pembahasan ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan Kanwil Kemenkum Kalsel dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pelayanan hukum dan pembentukan regulasi yang berkualitas dan berpihak pada masyarakat.

Ditjen AHU Percepat Pendirian Koperasi Merah Putih dengan Layanan 1.000 Koperasi per Jam

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum Republik Indonesia melaporkan progres percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) sebagai implementasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Data terbaru per 18 Mei 2025 mencatat 14.875 permohonan nama koperasi desa dan 1.191 untuk koperasi kelurahan merah putih, pendirian mencapai 767 koperasi desa dan 52 koperasi kelurahan merah putih, serta perubahan dari jenis koperasi lain sebanyak 8 koperasi desa merah putih.

Dirjen AHU Widodo menjelaskan, inovasi layanan digital Ditjen AHU mampu memproses legalisasi badan hukum koperasi dalam 1 jam untuk 1.000 dokumen, sehingga kapasitas harian mencapai 24.000 koperasi. "Dengan sistem ini, target 80.000 KDMP/KKMP dapat tercapai secara efisien," ujarnya dalam paparan resmi, Senin (19/5/2025).

Widodo menambahkan, terobosan ini sejalan dengan transformasi digital Kemenkum yang telah dijalankan secara menyeluruh. "Sistem AHU Online yang kami kembangkan tidak hanya mempercepat proses, tapi juga menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pendirian koperasi. Selain itu, saat ini seluruh notaris dapat mengakses dalam percepatan pembentukan KDMP/KKMP, tidak hanya notaris pembuat akta koperasi, guna mempercepat program ini," jelasnya.

Kemenkum telah menerbitkan Permenkum Nomor 13 Tahun 2025 untuk menyederhanakan prosedur, termasuk percepatan konversi 8 koperasi lama menjadi KDMP. Notaris diberi peran krusial sebagai fasilitator pengajuan melalui Sistem AHU Online dan pendamping hukum masyarakat, terutama di daerah tertinggal.

Widodo mengakui tantangan seperti rendahnya rasio pendirian setelah pemesanan nama. Untuk itu, Ditjen AHU akan memperkuat koordinasi dengan Kemenkop dan pemda, mengaktifkan notifikasi otomatis, serta menyediakan dashboard pemantauan real-time. "Kolaborasi multisektor ini mendukung Asta Cita ke-2 (swasembada pangan) dan ke-6 (pemerataan ekonomi)," tegasnya.

Langkah ini diharapkan mendorong ekonomi kerakyatan melalui 24.000 legalisasi koperasi per hari, dengan dukungan penuh dari seluruh notaris di Indonesia. "Kami pastikan masyarakat desa mendapat kepastian hukum cepat dan murah," Tutup Widodo.

Secara terpisah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti mendukung penuh percepatan layanan digital Ditjen AHU dalam pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai wujud konkret pelayanan hukum yang inklusif dan pro-rakyat. “Transformasi digital yang dilakukan Ditjen AHU ini membuka peluang besar bagi masyarakat desa dan kelurahan, termasuk di Kalimantan Selatan, untuk mendapatkan legalitas koperasi dengan cepat, transparan, dan efisien. Hal ini sangat penting dalam mendukung penguatan ekonomi lokal dan pemerataan pembangunan,” ujar Nuryanti.

Ia juga menegaskan bahwa Kantor Wilayah siap bersinergi dengan para notaris, pemerintah daerah, dan Kemenkop untuk mengakselerasi implementasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. “Kami dorong partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan agar target nasional pembentukan 80.000 koperasi dapat terealisasi dengan optimal,” tambahnya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan Gelar Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-117

Banjarmasin, Humas_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melaksanakan upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-117 Tahun 2025 pada Senin (20/05), bertempat di halaman upacara Kantor Wilayah. Mengusung tema "Bangkit Bersama Wujudkan Indonesia Kuat", kegiatan ini berlangsung dengan khidmat dan diikuti oleh seluruh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan serta dari Kantor Wilayah Kementerian HAM Kalimantan Selatan

Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti, memimpin jalannya kegiatan dengan penuh semangat kebangsaan. Dalam amanatnya, Ia membacakan sambutan dari Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia yang menekankan pentingnya menjaga semangat kebangkitan sebagai sebuah ikhtiar yang terus hidup. Kebangkitan disebut bukan sekadar peristiwa, melainkan proses berkelanjutan yang dibangun dari nilai-nilai dasar kehidupan masyarakat.

Dalam sambutan tersebut juga disampaikan bahwa prinsip politik luar negeri bebas dan aktif yang diusung sejak awal kemerdekaan menjadi pegangan bangsa dalam menghadapi dinamika global. Pemerintah pun telah menetapkan Asta Cita sebagai arah kebijakan nasional demi mewujudkan perubahan nyata di tengah masyarakat.

“Momentum ini mengingatkan kita untuk terus bekerja dengan integritas dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Kakanwil Nuryanti usai upacara.

Upacara ini turut diikuti oleh seluruh Pejabat Manajerial dan Non Manajerial Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan dan Kantor Wilayah Kementerian HAM Kalimantan Selatan. Peringatan Harkitnas menjadi ajakan reflektif untuk meneguhkan semangat kebangsaan dan komitmen dalam melayani, agar kebangkitan yang tumbuh dari nilai kemanusiaan dapat benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. (Humas Kanwil Kemenkum Kalsel, foto : Joel, teks : Pendi, ed : Eko)

Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Selatan Ikuti Webinar OKE KI Bahas Publikasi Paten

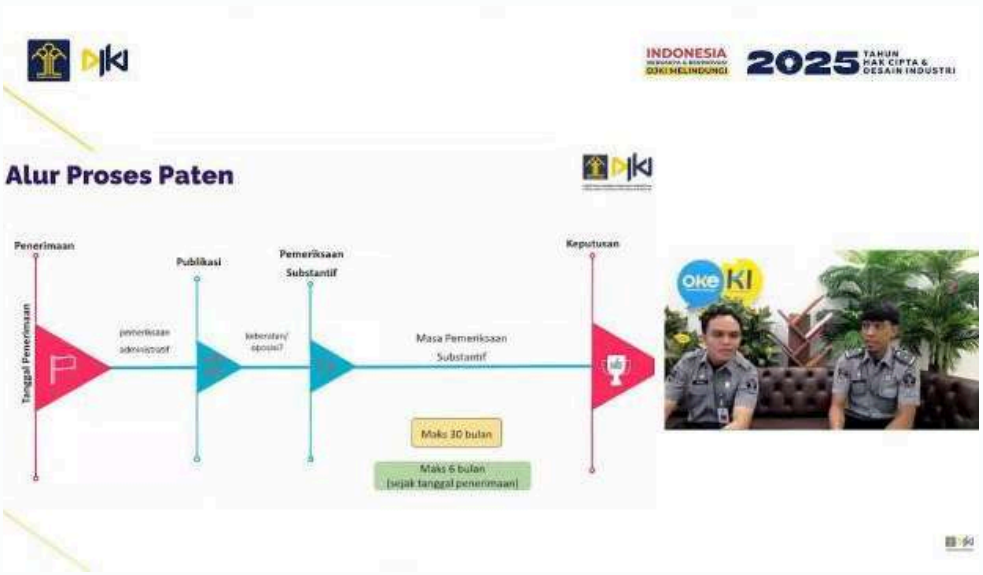

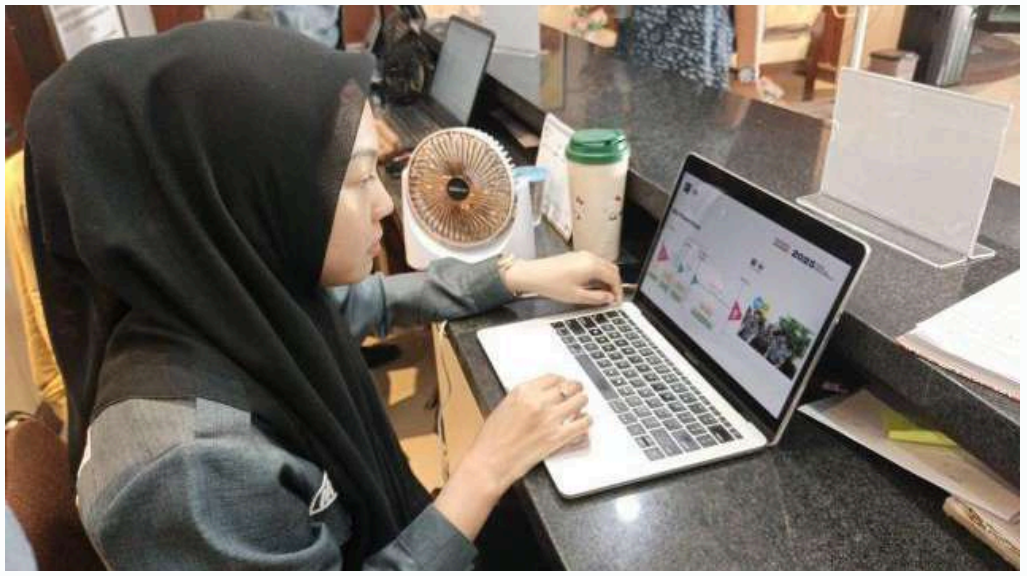

Banjarmasin, KI_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti webinar bertajuk "Publikasi Paten" yang diselenggarakan oleh OKE KI (Obrolan Kreatif dan Edukatif Kekayaan Intelektual) pada tanggal 19 Mei 2025. Kegiatan ini menjadi sarana edukatif yang membahas berbagai aspek penting mengenai publikasi paten serta perlindungan hukumnya.

Dalam webinar ini, Antario Terryandana selaku Pemeriksa Paten Muda hadir sebagai narasumber utama. Ia memaparkan materi mulai dari sejarah dan pengetahuan umum tentang paten, tata cara publikasi, hingga urgensi perlindungan hukum terhadap invensi atau temuan baru.

Menurut Antario, pemahaman menyeluruh mengenai proses publikasi paten sangat penting untuk membangun ekosistem inovasi yang sehat dan terlindungi. Ia juga menekankan bahwa publikasi paten bukan hanya soal formalitas, melainkan bagian dari strategi perlindungan hukum atas hasil cipta dan temuan yang bernilai ekonomi.

Dengan terselenggaranya webinar ini, diharapkan dapat menambah wawasan dan kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum, khususnya di bidang kekayaan intelektual. Edukasi semacam ini menjadi langkah konkret dalam menumbuhkan budaya menghargai karya serta mendukung pengembangan inovasi yang berdaya saing.

Koordinasi dan Konsultasi Raperda, Setda dan Sekretariat DPRD HSS Sambangi Kemenkum Kalsel

Banjarmasin, PPPH_Info - Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Setda Kab. HSS) dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Sekretariat DPRD Kab. HSS), melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan dalam rangka berkoordinasi terkait pengajuan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi, serta berkonsultasi penggunaan aplikasi e-harmonisasi, pada Senin, (19/05/2025)

Tim dari Bagian Hukum Setda Kab. HSS, dipimpin oleh S. Muhammad Hafiiz, selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, dan dari Sekretariat DPRD Kab. HSS diwakili oleh Deiwa Rizky, selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, dan diterima oleh Nizar Al Farisy, sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan.

Tujuan kedatangan dalam rangka penyampaian rencana pengajuan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yaitu tentang Rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah dan tentang Penambahan Penyertaan Modal Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah ini sangat penting pembentukannya, seperti terkait Rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah adalah dalam rangka memberikan arahan sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam menyelenggarakan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati Hulu Sungai Selatan. Selain itu penambahan penyertaan modal Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk membantu percepatan pembangunan ekonomi daerah dengan ditetapkannya kebijakan investasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Secara singkat juga disampaikan teknis penggunaan aplikasi e-harmonisasi berdasarkan hasil sosialisasi yang disampaikan tim kerja Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Aplikasi e-harmonisasi ini dibangun sebagai sarana pemanfaatan teknologi informasi, dengan tujuan menunjang pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi agar lebih efektif, efisien, dan terintegrasi.

Pada kesempatan lainnya diutarakan kepada perwakilan Sekretariat DPRD Kab. HSS, Deiwa Rizky, agar turut mengajukan permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, mengingat sampai bulan kelima pada Tahun 2025 ini belum ada pengajuan permohonan sama sekali. (Humas Kemenkum Kalsel, Kontributor: Nizar, ed: Eko/Arie)

Lantik Tiga Notaris Pengganti, Komitmen Kemenkum Kalsel: Jamin Keberlanjutan Pelayanan Kenotariatan

Banjarmasin, Humas_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Kalimantan Selatan terus berkomitmen dalam menjaga kelangsungan pelayanan kenotariatan dengan melantik notaris pengganti untuk menggantikan sementara notaris yang menjalani cuti sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, Selasa (20/5/25).

Pelantikan dan pengambilan sumpah Notaris Pengganti Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan Kabupaten Balangan kali ini dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah, Nuryanti Widyastuti, di hadapan para saksi, rohaniwan, serta tamu undangan yang terdiri dari pejabat manajerial dan non-manajerial Kantor Wilayah, serta keluarga dari notaris pengganti.

Adapun notaris yang dilantik dan diambil sumpahnya adalah:
- Wahyu Effendy, S.H., M.Kn. sebagai Notaris Pengganti Kabupaten Tanah Laut menggantikan sementara Norlaila Hayati, S.H., M.Kn., yang melaksanakan cuti selama 39 hari, terhitung mulai tanggal 23 Mei 2025 sampai dengan 30 Juni 2025.
- Mahya Rafiqa, S.H. sebagai Notaris Pengganti Kabupaten Hulu Sungai Tengah menggantikan sementara Rustini Hartati, S.H., M.Kn., yang melaksanakan cuti selama 30 hari, terhitung mulai tanggal 26 Mei 2025 sampai dengan 26 Juni 2025.
- Damang Prasetyanto, S.H. sebagai Notaris Pengganti Kabupaten Balangan menggantikan sementara Ayu Ika Novarina, S.H., M.Kn., yang melaksanakan cuti selama 40 hari, terhitung mulai tanggal 12 Juni 2025 sampai dengan 21 Juli 2025.

Dalam sambutannya, Nuryanti Widyastuti menegaskan bahwa pelantikan notaris pengganti ini bukan sekadar seremoni, melainkan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin terselenggaranya pelayanan hukum yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh seorang Notaris Pengganti sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

“Seorang Notaris Pengganti memegang peranan penting serta memiliki hak, kewenangan, dan konsekuensi hukum yang sama dengan Notaris definitif selama menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, Notaris Pengganti dituntut untuk bekerja dengan seksama, penuh kehati-hatian, dan cermat dalam menerima dan memproses setiap permohonan dari masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kakanwil juga mengingatkan pentingnya pemahaman terhadap prinsip perlindungan hukum bagi pengguna jasa serta menjaga integritas profesi notaris. Ia menekankan bahwa setiap notaris, termasuk Notaris Pengganti, wajib mengisi dan melaporkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) sebagai bagian dari mekanisme perlindungan hukum dan akuntabilitas profesi.

“Akhir kata, saya ucapkan selamat kepada Saudara/i Notaris Pengganti yang telah dilantik. Semoga dapat mengemban tugas dengan sebaik-baiknya, menjunjung tinggi nilai-nilai hukum, keadilan, dan integritas dalam setiap pelaksanaan tugas dan kewenangan,” pungkasnya.

Pelabuhan Barito Kuala Siap "Naik Kelas", Kanwil Kemenkum Kalsel Harmonisasikan Ranperda Perubahan Bentuk Hukumnya

Banjarmasin, Humas_Info – Pada Selasa, (20/05) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum melaksanakan rapat harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Barito Kuala tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pelabuhan Barito Kuala Mandiri menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Pelabuhan Barito Kuala Mandiri.

Rapat digelar secara tatap muka di ruang rapat Kepala Kanwil Kemenkum Kalsel dan dipimpin oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Bahjatul Mardiah. Turut hadir Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana, beserta tim perancang peraturan perundang-undangan Kanwil.

Sementara itu, dari pihak Pemerintah Kabupaten Barito Kuala hadir Plt. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Ibadurrahman, dan Kepala Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam, T. Syahbana. Dalam sambutannya, Ibadurrahman menyampaikan bahwa perubahan bentuk hukum perusahaan daerah menjadi Perseroda merupakan langkah strategis yang akan memberikan ruang lebih luas bagi pengembangan usaha dan peningkatan kinerja perusahaan.

"Potensi ini sangat besar dalam mendorong peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Barito Kuala. Karena itu, kami berharap proses harmonisasi dapat berjalan lancar agar Ranperda ini segera ditetapkan," ujarnya.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana, menyambut baik inisiatif Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam mengajukan harmonisasi Ranperda. Ia menegaskan bahwa Kanwil Kemenkum Kalsel terbuka terhadap seluruh permohonan harmonisasi peraturan perundang-undangan dari daerah.

“Kami minta agar bisa segera ditindak lanjuti masukan dan perbaikan yang disampaikan dalam rapat ini. Kami siap mendukung agar Ranperda ini dapat segera diselesaikan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Anton.

Rapat berlangsung dengan pembahasan konstruktif terhadap substansi Ranperda, serta penyelarasan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kegiatan ini menjadi bentuk komitmen Kanwil Kemenkum Kalsel dalam memberikan pendampingan dan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah yang berkualitas dan aspiratif.

Kemenkum Kalsel Ikuti Sosialisasi Layanan Penegasan Status Kewarganegaraan Secara Elektronik

Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti kegiatan Sosialisasi Layanan Penegasan Status Kewarganegaraan Secara Elektronik yang diselenggarakan secara daring oleh Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), pada Selasa (20/05).

Kegiatan ini diikuti langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Nuryanti Widyastuti, didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah, serta Kepala Bidang Pelayanan AHU, Dewi Woro Lestari, bersama jajaran di Ruang Pertemuan BerAkhlak Kantor Wilayah.

Sosialisasi ini merupakan tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Menteri Hukum Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penegasan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi WNI di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia. Aturan ini menjadi jawaban atas berbagai permasalahan kewarganegaraan yang dihadapi WNI di luar negeri, khususnya bagi mereka yang tidak memiliki dokumen kewarganegaraan yang sah atau undocumented.

Direktur Tata Negara Ditjen AHU, Dr. Dulyono, dalam paparannya menegaskan bahwa layanan penegasan status kini dapat dilakukan secara elektronik dan wajib dilaksanakan dalam waktu paling lama satu bulan sejak Permenkum tersebut diundangkan, yaitu sejak 22 Maret 2025. Melalui mekanisme ini, WNI di luar negeri dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Keterangan Status Kewarganegaraan (SKSK) sebagai dasar hukum dalam pengurusan dokumen keimigrasian.

Lebih dari 500.000 WNI undocumented saat ini diperkirakan tersebar di berbagai negara, seperti Malaysia, Amerika Serikat, Filipina, Taiwan, Hong Kong, dan Arab Saudi. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan proses pelayanan hukum dan administrasi kewarganegaraan dapat lebih tertib, terintegrasi, dan menjangkau seluruh WNI di luar negeri.

Kegiatan ini juga menghadirkan Direktorat Pelindungan WNI, Ditjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri. Dalam sesi pemaparan oleh Kementerian Luar Negeri, diungkapkan bahwa isu kewarganegaraan memiliki dampak langsung terhadap upaya pelindungan WNI di luar negeri. "Meningkatkan kualitas pelayanan dan pelindungan WNI di luar negeri merupakan prioritas utama. Isu kewarganegaraan, terutama bagi WNI overstayer dan undocumented, menjadi tantangan yang memerlukan kolaborasi lintas kementerian/lembaga," demikian disampaikan perwakilan Direktorat Pelindungan WNI.

Partisipasi aktif Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan dalam kegiatan ini menjadi bentuk dukungan nyata terhadap upaya peningkatan kualitas layanan administrasi hukum umum, khususnya dalam memberikan kepastian status kewarganegaraan bagi seluruh WNI, sesuai amanat konstitusi dan prinsip perlindungan maksimal terhadap warga negara.

Penandatanganan MoU dan PKS antara Kemenkum Kalsel dan DPRD Tapin Dukung Penguatan Regulasi Daerah

Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Kalimantan Selatan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapin secara resmi menandatangani Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama, Selasa (20/5/2025) di Balai Pertemuan Garuda Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan.

Penandatanganan ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat sinergi antara kedua instansi dalam bidang pembentukan peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, analisis kebijakan hukum, dan pelayanan hukum. Selain itu, dilakukan pula penandatanganan Perjanjian Kerja Sama mengenai fasilitasi penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah tentang perlindungan serta pemberdayaan produk lokal unggulan daerah.

Kegiatan diawali dengan laporan dari Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana, yang menyampaikan apresiasinya atas respons cepat Pemerintah Kabupaten Tapin terhadap perubahan nomenklatur Kementerian Hukum yang sebeleumnya adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

"Hal ini menjadi dasar penting dalam kerja sama ke depan," ujarnya.
Penandatanganan MoU dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah, Nuryanti Widyastuti dengan Ketua DPRD Kabupaten Tapin, Achmad Riduan Syah, disusul penandatanganan PKS oleh Kepala Divisi Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Anton Edward Wardhana bersama Sekretaris DPRD Tapin, Noor Ifansyah.

Ketua DPRD Tapin dalam sambutannya menyampaikan komitmen untuk terus membangun Kabupaten Tapin melalui peraturan daerah yang berkualitas dan berpihak pada kepentingan lokal.

“Kami harap kerja sama ini menghasilkan Perda yang efektif dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari, demi kesejahteraan masyarakat Tapin,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah, Nuryanti Widyastuti, dalam sambutannya memperkenalkan nomenklatur baru bahwa Kementerian Hukum merupakan hasil transformasi dari Kementerian Hukum dan HAM. Ia menjelaskan bahwa pembaruan MoU dan PKS menjadi penting untuk menyesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku.

“Kami berharap kerja sama ini memberikan manfaat nyata bagi Kabupaten Tapin dan Kementerian Hukum. Semoga sinergi ini terus berlanjut dan menguat,” ungkap Nuryanti.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh jajaran pimpinan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, seperti Kepala Divisi Pelayanan Hukum Meidy Firmansyah dan Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan, serta pejabat dari DPRD Kabupaten Tapin termasuk Kabag Hukum dan Perundangan beserta jajaran.

St. Petersburg International Legal Forum (ILF): Menteri Hukum Republik Indonesia Sampaikan Inisiatif dan Inovasi Hukum di bawah Kepemimpinan Presiden Prabowo

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, hadir pada 13th St. Petersburg International Legal Forum (ILF) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Federasi Rusia pada 20 Mei 2025. Dalam agenda Open Meeting of Justice Ministers yang dihadiri oleh Menteri Kehakiman Rusia dan Menteri-Menteri dalam bidang hukum dari 22 (dua puluh dua) negara mitra lainnya, Menteri Hukum menyampaikan capaian Kementerian Hukum Republik Indonesia dalam melakukan tranformasi digital sebagai bentuk implementasi dari Asta Cita, salah satunya dengan meluncurkan inisiatif "Transformasi Digital" melalui https://kemenkum.go.id/ sebagai portal terintegrasi bagi seluruh layanan hukum yang berbasis digital. Inisiatif ini merupakan perwujudan aspek transparansi, efisiensi, dan aksesibilitas dalam layanan hukum di Indonesia.

"Sebagai Menteri Hukum, saya memprioritaskan percepatan digitalisasi dan integrasi dari seluruh layanan hukum di kementerian. Tujuan kami adalah untuk membangun institusi hukum yang profesional, modern, dan inovatif dengan dukungan teknologi guna memastikan masyarakat dapat mengakses dan memonitor proses layanan melalui satu portal dari mana saja," ungkapnya.

Lebih lanjut, Menteri Hukum menyampaikan beberapa inisiatif utama dari program ini, antara lain Digitalisasi Layanan Hukum, Sistem Data yang Terintegrasi, dan Dashboard Eksekutif. "Seluruh inisiatif ini merupakan bagian dari strategi yang lebih besar untuk mendukung implementasi pemerintahan digital sebagai salah satu pilar dari Visi Indonesia Digital 2045", ujar Menteri Hukum.

Di depan 22 negara mitra, Supratman Andi Agtas mengakhiri statement dengan menegaskan pentingnya transformasi digital dalam meningkatkan layanan hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik. Menteri Hukum juga menyambut peluang kerja sama dan pertukaran pengalaman dalam bidang transformasi digital dengan negara-negara yang hadir pada Open Meeting of Justice Ministers untuk membangun ekosistem digital global yang tangguh dan berbudaya.

ILF merupakan salah satu platform penting bagi Indonesia untuk menyiarkan inovasi di bidang hukum yang dapat diapresiasi oleh negara-negara mitra dan sebagai ruang untuk membuka kerja sama dalam peningkatan layanan hukum. Forum ini membuka kesempatan bagi para peserta untuk melakukan dialog bersama dengan anggota komunitas hukum, bisnis, politik, dan penegak hukum dari berbagai negara.

Secara terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti mendukung penuh kehadiran dan penyampaian langsung oleh Menteri Hukum Republik Indonesia dalam forum hukum internasional tersebut.

"Transformasi digital yang diusung menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menghadirkan layanan hukum yang semakin transparan, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat. Di tingkat wilayah, kami siap mendukung penuh arahan Menteri Hukum melalui optimalisasi seluruh layanan berbasis digital serta memperkuat kolaborasi untuk mewujudkan ekosistem hukum yang modern dan adaptif di era pemerintahan Presiden Prabowo," tegas Nuryanti.

Ditjen AHU Gerak Cepat! 53.579 WNI Tak Dokumen di Luar Negeri, Permenkum 6/2025 Jadi Solusi

Jakarta – Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU), Widodo, melaporkan progres penegasan status kewarganegaraan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) tanpa dokumen di luar negeri. Data terbaru per Mei 2025 tercatat 53.579 permohonan penegasan status, dengan rincian 45.126 kasus di Malaysia, 5.275 di Arab Saudi, 2.762 di Filipina, dan 416 di Timor Leste.

Widodo menyebut, Permenkum No. 6 Tahun 2025 yang terbit 14 Februari lalu menjadi dasar percepatan penegasan status kewarganegaraan. Lewat kolaborasi dengan Perwakilan RI di luar negeri, proses verifikasi dan penerbitan Surat Keterangan Status Kewarganegaraan (SKSK) kini bisa dilakukan lebih cepat dan efisien.

Layanan elektronik penegasan status kewarganegaraan memastikan verifikasi dokumen dan wawancara langsung oleh Perwakilan RI sebelum diteruskan ke Ditjen AHU. Sistem ini mempercepat proses dan memberikan kepastian hukum bagi WNI di luar negeri.

“Hingga kini, Ditjen AHU telah menyelesaikan penegasan status kewarganegaraan sebanyak 45.126 kasus di Malaysia, 5.275 kasus di Arab Saudi, 2.762 kasus di Filipina, dan 416 kasus di Timor Leste. Namun, tantangan tetap ada, terutama rendahnya kesadaran dokumentasi dan tingginya arus migrasi ilegal yang masih menjadi kendala di lapangan " ujar Widodo (20/05/2025).

Kementerian Hukum melalui Ditjen AHU menjawab tantangan tersebut dengan langkah-langkah optimis dengan memperkuat sosialisasi melalui workshop dan panduan bagi Perwakilan RI, terutama di negara dengan populasi WNI tinggi.

"Ini bukan sekadar urusan administrasi, melainkan upaya menyelamatkan hak dasar warga negara dan melindungi martabat bangsa," tegas Widodo.

Adanya rencana pencabutan moratorium Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi, saat ini Ditjen AHU menyiapkan mekanisme percepatan penegasan status kewarganegaraan untuk mengantisipasi lonjakan permohonan. Upaya ini juga sejalan dengan program sosialisasi dokumentasi kewarganegaraan bagi PMI agar terhindar dari risiko ketiadaan identitas.

“Langkah ini mendukung program prioritas pemerintah khususnya dalam memperkuat perlindungan WNI di luar negeri yang juga bisa menjadi dampak positif langsung pada kontribusi peningkatan devisa negara," pungkas Widodo.

Secara terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti menyambut baik terobosan Ditjen AHU melalui Permenkum Nomor 6 Tahun 2025 sebagai solusi nyata bagi WNI tanpa dokumen di luar negeri. “Langkah ini menunjukkan keberpihakan negara dalam memastikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara, di manapun mereka berada. Di daerah, kami akan memperkuat sinergi lintas instansi guna meningkatkan kesadaran dokumentasi kewarganegaraan sejak dini, termasuk bagi calon pekerja migran agar hak-hak mereka tetap terlindungi secara sah dan bermartabat,” ujar Nuryanti.

Maknai Kebangkitan Nasional Sebagai Upaya Bangun Masa Depan yang Berpihak Pada Rakyat

Jakarta - Hari Kebangkitan Nasional lahir melalui pendirian Budi Utomo yang memberikan kesadaran, bahwa kemajuan bisa dicapai bila masyarakat bangkit di atas kekuatan sendiri. Dengan semangat kebangkitan, masa depan yang maju akan tercipta, meski berangkat dari hal yang mendasar dan fondasi sederhana.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Dirjen PP), Dhahana Putra, dalam Upacara Bersama Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke 117 di lingkungan Kementerian Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Selasa (20/05).

"Tepat di tanggal 20 Mei ini, kita sedang membuka kembali halaman penting dari sejarah perjuangan bangsa yang ditulis dengan kebangkitan kesadaran, semangat persatuan, dan keberanian menolak untuk terus terjajah," ujar Dhahana, selaku inspektur upacara.

"Dalam semangat kebangkitan meneguhkan kembali arah perjalanan bangsa, pemerintah menetapkan Asta Cita, berisi delapan misi besar untuk menghadirkan perubahan di tengah masyarakat," jelas Dhahana di lapangan upacara Kementerian Hukum, Jakarta.

Di balik setiap kebijakan, lanjut Dhahana, selalu ada tujuan pemerintah agar setiap rakyat merasa dilibatkan dan diberdayakan dalam kemajuan bangsanya sendiri.

Dalam 150 hari pertama pemerintahan Kabinet Merah Putih, pemerintah memastikan setiap kebijakannya membuka ruang bagi kemajuan yang adil dan merata. Kebijakan-kebijakan seperti Program Makan Bergizi Gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga pembentukan Danantara, menjadi wujud komitmen pemerintah bahwa negara hadir untuk rakyat.

"Pemerintah percaya, kebangkitan yang besar justru dibangun dari kehidupan yang tenang, perut yang kenyang, dan hati lapang," papar Dhahana.

Di akhir amanatnya, Dhahana mengajak seluruh peserta upacara sekaligus masyarakat untuk menanamkan semangat kebangkitan sebagai ikhtiar yang terus hidup. Karena kebangkitan yang kokoh adalah kebangkitan yang tumbuh perlahan, berakar dalam nilai-nilai kemanusiaan, dan berbuah pada keadilan serta kesejahteraan yang dirasakan bersama.

"Mari jaga kebangkitan dengan semangat seperti akar pohon yang menembus tanah, perlahan, tak selalu terlihat namun kokoh menopang kehidupan," tutup Dhahana.

Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei. Di hari peringatannya yang ke 117 ini, mengangkat tema 'Bangkit Bersama Wujudkan Indonesia Kuat', pemerintah mengajak seluruh masyarakat untuk bersama bangkit dari berbagai tantangan, baik sosial, ekonomi, maupun lingkungan.

Secara terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti turut menyampaikan bahwa Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-117 menjadi momentum penting bagi seluruh jajaran Kementerian Hukum untuk memperkuat komitmen dalam membangun pelayanan hukum yang berpihak kepada rakyat. “Semangat kebangkitan yang ditanamkan oleh para pendiri bangsa harus terus kita hidupkan melalui kerja nyata, keberpihakan terhadap keadilan, serta keberanian melakukan transformasi demi kemajuan yang merata dan berkeadilan. Kami di Kalimantan Selatan siap melanjutkan semangat ini dalam setiap kebijakan dan pelayanan yang kami berikan kepada masyarakat,” ungkap Nuryanti.

Monitoring dan Evaluasi Desa Sadar Hukum, Kanwil Kemenkum Kalsel Jelaskan Pentingnya Posbankum di Desa

Banjarmasin Humas Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Desa Sadar Hukum dan Pembentukan Pos Bantuan Hukum. Kegiatan dilaksanakan oleh Dianor (Penyuluh Hukum Ahli Muda) selaku Koordinator Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum, Tulus Achir Cahyadi (Penyuluh Hukum Ahli Pertama), Togi Leonardo Situmorang (Penyuluh Hukum Ahli Pertama), dan Tutus Bahtiar (Penyuluh Hukum Ahli Pertama). Tim Kanwil Kemenkum Kalsel melaksanakan kegiatan tersebut di Desa Sumber Makmur Kecamatan Pelaihari dan Desa Ambawang Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, Selasa (20/5).

Dalam kegiatan tersebut Dianor menyampaikan terkait dengan maksud dan tujuan agenda.
"Dalam rangka meningkatkan kualitas dan efektivitas pembangunan hukum di desa, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) mewajibkan setiap Desa/Kelurahan untuk mendirikan Pos Bankum pada setiap Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum," ungkap Dianor.

"Pembentukan Posbankum di tingkat desa/kelurahan merupakan langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan, khususnya bagi masyarakat di wilayah pedesaan. Adapun kehadiran Posbankum bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum yang mudah dijangkau, sekaligus menjadi wadah penyelesaian sengketa, peningkatan kesadaran hukum,dan pendampingan hukum bagi masyarakat", tambahnya.

Di Desa Sumber Makmur, Tim Kanwil Kemenkum Kalsel disambut Surarjo (Kepala Desa Sumber Makmur) dan di Desa Abawang disabut Oleh Hamidah (Sekretaris Desa Ambawang) beserta jajaran anggota Posbankum. Adapun Kepala Desa Sumber Makmur dan Kepala Desa Ambawang, keduanya merupakan perwakilan peserta Peacemaker Justice Award (PJA) dari Kabupaten Tanah laut.
Terkait pembangunan hukum di desa, Sutarjo menjelasakan progres pembentukan Posbankum di Desa Sumber Makmur.

"Kami sejauh ini telah menerbitkan SK Kelompok Kadarkum dan SK Posbankum, hal ini merupakan komitmen kami dalam melakukan pembangunan hukum di desa, dan saat ini dalam proses pembentukan Desa Binaan Sadar Hukum, untuk itu kami telah berkoordinasi dengan Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Laut", Papar Sutarjo.

Dalam kegiatan, Tim Kanwil Kemenkum Kalsel memeriksa secara langsung terhadap kelengkapan administrasi khususnya terkait SK Pembentukan Posbankum, Ketersediaan sarana dan prasarana berupa ruangan dilengkapi Sumber Daya Manusia (SDM) Paralegal dan fasilitas (kursi, meja, spanduk).

Untuk memastikan berjalannya Posbankum di desa dengan baik, Dianor menjelaskan perihal pentingnya Paralegal dan layanan apa saja di dalamnya.

"Guna menjamin keberadaan Posbankum berjalan dengan baik, diperlukan adanya Paralegal sebagai mesin utama dalam menjalankan layanan-layanan Posbankum seperti Layanan Informaai Hukum dan Konsultasi Hukum, Layanan Bantuan Hukum dan Advokasi, Layanan Penyelesaian Konflik/Sengketa melalui Mediasi, dan Layanan Rujukan Hukum", Jelas Dianor.

Selain itu, Dianor berpesan kepada Kepala Desa agar dapat terlibat aktif dalam kegiatan penyelesaian sengketa/konflik di desa.
"Ke depan, sosok Kepala Desa diharapkan dapat berperan Aktif dalam penyelesaian sengketa/konflik. Khusus nya permasalahan hukum ringan, kiranya dapat diusahakan untuk diselesaikan secara kekeluargaan, apalagi Kepala Desa Sumber Makmur dan Kepala Desa Ambawang saat ini menjadi peserta PJA Tahun 2025", tukas Dianor.
Menutup kegiatan, jajaran Penyuluh Hukum menyampaikan kepada perangkat desa, bahwasanya Kanwil Kemenkum Kalsel selalu membuka ruang koordinasi dan komunikasi seluas-luasnya apabila ada kendala dalam Pembentukan Pos Bantuan Hukum di Desa.

Kanwil Kemenkum Kalsel Laksanakan RAT Koperasi Pengayoman dengan Semangat Transparansi dan Akuntabilitas

Banjarmasin, Humas_info – Koperasi Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Pengayoman Tahun Buku 2024 pada Rabu (21/05). Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus kepada anggota atas pengelolaan koperasi selama satu tahun buku.

RAT dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah, Nuryanti Widyastuti, didampingi oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardana, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah serta Ketua Koperasi Pengayoman Kanwil Kalsel, Ahmad Zubaidi.

Peserta RAT merupakan seluruh anggota Koperasi Pengayoman yang berasal dari Kementerian Hukum maupun Kementerian HAM dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Dalam sambutannya, Kakanwil menyampaikan apresiasi terhadap penyelenggaraan RAT yang dilakukan secara rutin dan tepat waktu, sebagai cerminan tata kelola yang baik. Ia menegaskan bahwa koperasi berperan besar dalam meningkatkan kesejahteraan pegawai.

“Koperasi ini memiliki manfaat besar bagi anggota. Rapat tahunan yang tepat waktu menunjukkan bahwa pengurus bekerja dengan tertib dan profesional. Meski belum sempurna, pengurus telah bekerja secara optimal dan tetap membutuhkan saran serta masukan dari anggota demi perbaikan ke depan,” ujar Nuryanti.

Kakanwil juga menekankan pentingnya partisipasi aktif seluruh anggota sebagai faktor utama dalam kemajuan koperasi. Usai sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban oleh Ketua Koperasi, Ahmad Zubaidi. Ia menyampaikan ringkasan kinerja koperasi selama Tahun Buku 2024, termasuk perkembangan usaha, laporan keuangan, serta evaluasi dan rencana strategis ke depan.

RAT juga memberikan ruang kepada para anggota untuk menyampaikan kritik, saran, serta pandangan terhadap pengelolaan koperasi secara terbuka dan konstruktif. Momen diskusi ini menjadi sarana penting untuk menyerap aspirasi anggota demi penyempurnaan pelayanan dan manajemen koperasi.

Kegiatan ditutup dengan pemberian doorprize kepada anggota sebagai bentuk apresiasi dan motivasi, yang turut menambah semarak suasana kebersamaan dalam kegiatan tahunan tersebut. Melalui RAT ini, Koperasi Pengayoman Kalimantan Selatan menunjukkan komitmennya dalam membangun tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Sinergi Pemprov dan Kanwil Kemenkum Kalsel Wujudkan Regulasi Tepat Sasaran

Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) menggelar Rapat Harmonisasi bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, membahas dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), Rabu (21/05/2025).

Rapat dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH), Anton Edward Wardhana, didampingi Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Bahjahtul Mardiah, serta diikuti oleh para Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Kalsel.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Selatan, Ariadi Noor, didampingi Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Musyridyansyah, beserta jajaran dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Bappeda, serta Biro Hukum Provinsi Kalimantan Selatan.

Adapun dua Ranperda yang dibahas dalam rapat harmonisasi tersebut yaitu:
1. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tentang Pembiayaan Tahun Jamak; dan
2. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan.

Dalam sambutannya, Anton Edward Wardhana menekankan bahwa proses harmonisasi merupakan amanat dari Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

"Harmonisasi diperlukan untuk memastikan agar setiap Ranperda selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menjamin kepastian hukum dan efektivitas penerapannya di lapangan," ujar Anton.

Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, Ariadi Noor, menyampaikan apresiasinya atas pelaksanaan harmonisasi dan berharap proses ini menghasilkan regulasi yang solutif dan berkualitas.

"Kami berharap hasil harmonisasi ini mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kalimantan Selatan," ungkap Ariadi.

Dalam forum tersebut, dijelaskan bahwa Ranperda tentang Pembiayaan Tahun Jamak dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah yang memerlukan waktu lebih dari satu tahun anggaran. Sedangkan Ranperda tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan disusun sebagai strategi pengelolaan kependudukan yang mencakup aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas penduduk secara menyeluruh dan terencana.

Proses harmonisasi berlangsung kondusif dan konstruktif, ditandai dengan pembahasan substansi yang mendalam. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Bahjahtul Mardiah, bersama tim memberikan berbagai masukan dan perbaikan terhadap kedua Ranperda, termasuk dalam pembulatan konsep dan penajaman norma.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap regulasi yang dihasilkan tidak hanya sesuai secara yuridis, tetapi juga aplikatif dan berpihak pada kepentingan masyarakat," tegas Bahjahtul.

Podcast bersama Kemenkum Kalsel: Bahas Antisipasi Penyimpangan Ormas

Banjarbaru, AHU_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan kembali menunjukkan komitmen dalam memperkuat ketahanan sosial melalui penyuluhan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan (ormas). Bertempat di Uncle B Coffee Banjarbaru, digelar sebuah podcast bertema "Antisipasi Kerawanan Penyimpangan Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Melalui Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Inklusif" pada Selasa (20/05/2025).

Podcast ini menghadirkan sejumlah narasumber kompeten, di antaranya Dewi Woro Lestari selaku Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) Kanwil Kemenkum Kalsel, Sundusiah dari Badan Kesbangpol selaku Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan, serta akademisi dari FISIP Universitas Lambung Mangkurat, Siswanto. Acara dipandu oleh Henny sebagai host dari Podcast Uncle B.

Dalam dialog tersebut, para narasumber membahas peran penting Ormas dalam kehidupan demokrasi serta potensi kerawanan yang muncul akibat penyimpangan fungsi oleh sebagian kecil Ormas. Mulai dari penyebaran paham intoleran, penyalahgunaan kewenangan, hingga keterlibatan dalam aktivitas ilegal. Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah karena dapat mengganggu ketertiban umum, stabilitas daerah, hingga iklim investasi.

Dewi Woro Lestari dalam paparannya menyampaikan bahwa melalui podcast seperti ini, masyarakat diharapkan semakin teredukasi mengenai pentingnya menaati aturan hukum dalam menjalankan organisasi. "Kami ingin Ormas-Ormas memahami batasan hukum dan tidak melenceng dari tujuan sosialnya. Bila menyimpang, sanksinya bisa berat, termasuk pencabutan status badan hukum," ujarnya.

Ia juga mengapresiasi terselenggaranya kegiatan ini sebagai upaya kreatif dan inklusif dalam menyampaikan edukasi hukum kepada masyarakat.

Podcast ini bukan hanya menjadi wadah penyuluhan hukum, tetapi juga forum dialog interaktif lintas komunitas yang mendorong pendekatan partisipatif. Diharapkan, Ormas yang ada di Kalimantan Selatan dapat menjalankan perannya secara konstruktif dan tetap berada dalam koridor hukum demi terciptanya kehidupan sosial yang harmonis dan inklusif.

Rusia Dukung Indonesia menjadi anggota Hague Conference on Private International Law (HCCH)

St. Petersburg, 21 Mei 2025 – Dalam rangkaian kunjungan kerja Menteri Hukum Republik Indonesia ke Rusia, hubungan bilateral antara kedua negara kembali diperkuat melalui pertemuan bilateral dengan Menteri Kehakiman Rusia, Konstantin Chuychenko.

Russia memberikan dukungan terhadap keanggotaan Indonesia pada HCCH. Saat ini Indonesia sedang dalam proses untuk menjadi anggota HCCH, suatu organisasi internasional yang mempunyai misi melakukan unifikasi progresif terhadap aturan hukum perdata internasional. Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah Indonesia yang saat ini sedang dalam proses pembentukan Rancangan Undang-undang tentang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2025.

“Pemerintah Rusia mendung penuh keanggotaan Indonesia di HCCH dan mendukung juga Indonesia mengaksesi services convention yang merupakan bagian dari HCCH”, ujar Chuichenko Konstantin, Menteri Kehakiman Rusia.

Kerja sama di bidang perdata dan komersial ini, melengkapi kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Federasi Rusia yang telah dimiliki sebelumnya yaitu perjanjian bilateral bantuan timbal balik dalam masalah pidana (Mutual Legal Assistance in Criminal Matters/MLA Pidana) yang telah ditandatangani pada 13 Desember 2019 serta perjanjian ekstradisi yang telah ditandatangani pada 31 Maret 2023.

Perjanjian MLA pidana dengan Rusia telah diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 2021 dan secara efektif telah berlaku sejak tanggal 18 Desember 2021. Adapun untuk perjanjian ekstradisi RI-Rusia saat ini sedang dalam proses ratifikasi melalui pembentukan Undang-undang. Walaupun proses ratifikasi atas perjanjian ekstradisi RI-Rusia masih berjalan, mengingat hubungan baik dan kerja sama yang telah terjalin selama ini antara Pemerintah Indonesia dan Federasi Rusia, kerja sama untuk ekstradisi antara kedua negara berjalan dengan baik. Dalam pertemuan bilateral ini dibahas perkembangan permintaan MLA dan ekstradisi antara Indonesia dan Rusia yang sedang dalam proses.

Pertemuan bilateral antara Menteri Hukum dan Menteri Kehakiman Rusia ini didahului dengan penandatanganan Memorandum Saling Pengertian (Memorandum of Understanding/MoU) bidang Non-Profit Organization atau organisasi nirlaba pada Selasa, 20 Mei 2025.

MoU ini merupakan media bagi kedua negara untuk membentuk kerangka kerja sama hukum mengenai organisasi nirlaba. Rencana kerja sama ini mencakup pertukaran dokumen, pengalaman, dan informasi mengenai pendirian, pendaftaran, dan pembubaran organisasi nirlaba sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi masing-masing negara, serta penyelenggaraan konsultasi ahli, seminar, dan lokakarya tentang topik-topik khusus yang menjadi kepentingan bersama terkait dengan organisasi nirlaba, termasuk pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan bahwa kerja sama ini dapat mendukung peran Kementerian Hukum dalam implementasi Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (Stranas TPPU dan TPPT), mengingat entitas nirlaba diakui sebagai salah satu sektor yang rentan disalahgunakan untuk tujuan pencucian uang atau pendanaan terorisme.

Diharapkan melalui kerja sama ini Kementerian Hukum, khususnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagai koordinator implementasi atas pelaksanaan MoU, mendapatkan informasi dan mempelajari best practices untuk terus menyempurnakan sistem pendaftaran dan pengawasan organisasi nirlaba, memperkuat kapasitas nasional dalam mitigasi risiko TPPU dan TPPT di sektor nirlaba dan secara efektif berkontribusi pada pencapaian target-target dalam rencana aksi Stranas TPPU dan TPPT.

“Menindaklanjuti MoU terkait kerja sama di bidang hukum yang telah ditandatangani pada Mei 2023 lalu serta MoU terkait kerja sama di bidang Non-Profit Organizations yang baru saja ditandatangani kemarin, diharapkan kedepannya dapat disusun suatu work plan sebagai bentuk implementasi atas kedua MoU ini”. Tutur Supratman Andi Agtas.
Kedua pihak berkomitmen untuk menindaklanjuti kedua MoU yang telah ditandatangani melalui kerja sama di bidang-bidang yang menjadi perhatian bersama di bawah portofolio kedua Kementerian.
Secara terpisah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti menanggapi positif Dukungan Rusia terhadap proses keanggotaan Indonesia dalam Hague Conference on Private International Law (HCCH) merupakan langkah strategis dalam memperkuat posisi Indonesia dalam sistem hukum perdata internasional.
“Hal ini sejalan dengan penguatan infrastruktur hukum nasional, termasuk penyusunan RUU Hukum Perdata Internasional. Di daerah, kami mendukung penuh agenda nasional ini melalui peningkatan kapasitas hukum, termasuk dalam aspek edukasi publik, pembinaan notaris, serta pengawasan terhadap organisasi nirlaba, agar selaras dengan semangat kerja sama internasional dalam pencegahan tindak pidana lintas negara seperti TPPU dan pendanaan terorisme,” ujar Nuryanti.

Dorong Sinergi Pembentukan Regulasi, Kanwil Kemenkum Kalsel dan Biro Hukum Setda Gelar Rapat Bersama

Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) menggelar rapat bersama Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), Rabu (21/05). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penguatan kualitas produk hukum daerah di tingkat kabupaten/kota.

Rapat dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana, yang dalam kesempatan tersebut juga memperkenalkan aplikasi e-Harmonisasi—sebuah inovasi digital dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan. Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan proses permohonan harmonisasi Ranperda dan Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota (Ranperbup), sekaligus mempercepat koordinasi lintas instansi.

Kegiatan yang berlangsung di aula Balai Pertemuan Garuda ini juga menjadi ruang diskusi terbuka bagi para pemangku kepentingan dalam pembentukan produk hukum daerah. Perwakilan dari Biro Hukum Setda Provinsi, Said, selaku Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan, menyoroti salah satu kendala utama di lapangan, yakni ketidaktersediaan anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Menurutnya, hal ini berdampak langsung pada minimnya inisiatif pembentukan peraturan daerah yang dibutuhkan masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Bahjatul Mardhiah selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya menyampaikan bahwa selama ini pihak Kementerian Hukum masih belum banyak mengetahui secara rinci permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah di lapangan. Hal ini menjadi catatan penting untuk perbaikan sistem pendampingan regulasi ke depan.

Sementara itu, Danang Agung Nugroho, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda menyampaikan bahwa pihaknya siap memberikan evaluasi dan rekomendasi terhadap daerah-daerah yang dinilai belum optimal atau underperform dalam penyusunan Ranperda. Ia juga menegaskan perlunya peningkatan pemahaman dan kesadaran dari SKPD akan pentingnya produk hukum sebagai landasan pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan publik.

Melalui sinergi ini, diharapkan lahir regulasi daerah yang tidak hanya memenuhi aspek prosedural dan substansi hukum, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta sejalan dengan prinsip-prinsip perundang-undangan yang baik dan benar.

Kemenkum Kalsel Laksanakan Koordinasi Bersama Notaris dan Dinas Terkait Percepatan Koperasi Merah Putih di Tabalong dan Balangan

Tabalong, Humas_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melaksanakan kegiatan koordinasi dengan para Notaris yang tergabung dalam Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kabupaten Tabalong terkait pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Rabu (21/05), bertempat di Hotel Jelita Tanjung, Kabupaten Tabalong. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU), Dr. Widodo, dalam rangka percepatan pengesahan Koperasi Merah Putih sebagaimana menjadi atensi Presiden RI, yang menargetkan peluncuran 80 ribu koperasi tersebut secara nasional pada 12 Juni mendatang.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Nuryanti Widyastuti, didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah, serta Kepala Bidang Pelayanan Hukum AHU, Dewi Woro Lestari, beserta jajaran staf Bidang Pelayanan AHU. Hadir pula sebagai peserta para Notaris di wilayah Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Balangan serta perwakilan dari Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong.

“Saya ingin mengingatkan kembali pentingnya layanan AHU, termasuk pendaftaran fidusia. Jangan sampai fidusia baru didaftarkan ketika pinjaman bermasalah. Justru harus sejak awal dilakukan, agar tercipta tertib administrasi dan perlindungan hukum,” tegas Nuryanti Widyastuti dalam arahannya.

Lebih lanjut, Nuryanti menyampaikan bahwa pembentukan Koperasi Merah Putih merupakan arahan Presiden yang melibatkan Pemerintah Daerah. Ia mendorong sinergi semua pihak agar percepatan pendirian koperasi di Kalimantan Selatan berjalan lancar dan sesuai ketentuan.

Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah, mengungkapkan bahwa 14 desa/kelurahan di Tabalong telah melaksanakan Musdes/Muskel dan dihimbau segera memesan nama koperasi. Format dokumen telah tersedia, dan peran Notaris diperlukan untuk memastikan kelengkapan dan ketepatan administrasi. Menanggapi hal ini, Milawati selaku Kepala Bidang Koperasi Kabupaten Tabalong menyatakan siap mendorong percepatan pemesanan nama koperasi di wilayahnya.

Dorong Keadilan hingga Pelosok, Kemenkum Kalsel Gaungkan Pos Bantuan Hukum Desa di Hulu Sungai Tengah

HST, Humas_Info - Dalam upaya memperluas akses terhadap keadilan serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan koordinasi aktif ke sejumlah kabupaten, termasuk Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST).

Kunjungan Kanwil Kemenkum Kalsel ke Bagian Hukum Sekretariat Daerah HST (21/05) difokuskan pada mendorong berbagai inisiatif strategis, seperti pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat desa dan kelurahan.

Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Kalsel, Togi Leonardo Situmorang, menyampaikan bahwa koordinasi ini bertujuan untuk mencapai empat hal utama. Pertama, mendorong keterlibatan kepala desa dan lurah dalam ajang Peacemaker Justice Award serta pelatihan paralegal. Tujuannya adalah menghadirkan Posbankum di setiap desa/kelurahan, sehingga masyarakat memiliki akses rujukan hukum awal yang cepat dan adil tanpa harus langsung ke pengadilan.

“Kita ingin masyarakat memiliki tempat konsultasi hukum yang mudah dijangkau. Posbankum hadir sebagai solusi awal penyelesaian sengketa secara cepat dan adil di tingkat lokal,” ujar Togi.

Kedua, Kanwil Kemenkum Kalsel juga mendorong pembentukan desa/kelurahan binaan sebagai langkah awal menuju status desa/kelurahan sadar hukum. Ketiga, mendukung keberadaan regulasi daerah seperti Perda tentang Bantuan Hukum bagi masyarakat kurang mampu. Keempat, memastikan adanya pembinaan berkelanjutan terhadap jabatan fungsional Penyuluh Hukum di wilayah HST.

Menanggapi program ini, Kepala Bagian Hukum Setda HST, Taufik Rahman, mengapresiasi inisiatif tersebut. Ia menyebutkan bahwa Posbankum merupakan bentuk inovasi penting, terutama untuk menyelesaikan perkara hukum sederhana langsung di desa.

“Program ini sangat positif. Dengan adanya Posbankum, masyarakat desa dapat menerima informasi hukum dan layanan bantuan hukum secara langsung, baik litigasi maupun non litigasi,” ungkap Taufik.

Ia juga menekankan pentingnya penunjukan SDM di tingkat desa yang akan dibina agar mampu mendampingi dan mengawasi proses hukum di lingkungannya.

Sementara itu, empat penyuluh hukum di wilayah HST turut diharapkan aktif dalam kegiatan penyuluhan serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Jika menghadapi hambatan, mereka dapat langsung berkoordinasi dengan Kanwil Kemenkum Kalsel.

Penyuluh Hukum Setda Kabupaten HST, Muhammad Saukani Fahma, menyatakan dukungannya atas arahan Kemenkum Kalsel. Ia menyebut bahwa pihaknya siap menjalankan program nasional ini.

“Dengan kolaborasi semua pihak, kami optimistis program Posbankum dan pembentukan desa/kelurahan binaan dapat berjalan efektif dan sesuai ketentuan, demi membangun masyarakat yang melek hukum dan sadar akan hak serta kewajibannya,” pungkasnya.

Ditjen AHU Percepat Digitalisasi Layanan Hukum dan Koperasi Merah Putih

Jakarta – Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU), Widodo, memaparkan berbagai capaian Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) dalam penyelenggaraan layanan hukum di depan Komisi XIII DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat di Gedung DPR, Rabu (21/05/2025). Dalam pertemuan ini, Widodo menegaskan komitmen Ditjen AHU untuk terus memperkuat digitalisasi layanan dan mendorong efisiensi meski dihadapkan pada pemangkasan anggaran.

"Transformasi digital ini tetap kami dorong dengan kondisi efisiensi dan berbagai inovasi agar seluruh layanan dapat segera online sepenuhnya. Sebelumnya dari 70 layanan online dan 74 layanan manual, kini sudah bertransformasi menjadi 93 layanan online. Sisanya 51 layanan manual kami upayakan selesai pada Juli tahun ini," ujar Widodo.

Widodo juga memaparkan data kontribusi Ditjen AHU dalam Pendapatan Negara Bukan pajak (PNBP) hingga pertengahan Mei 2025, tercatat sebesar Rp445,3 miliar, naik 2,65% dibanding tahun sebelumnya. Tiga layanan utama penyumbang terbesar adalah layanan fidusia (64,77%), layanan badan hukum (23,67%), dan layanan kenotariatan (5,35%).

Tak hanya itu, Ditjen AHU juga memfasilitasi naturalisasi atlet nasional, termasuk pemain sepak bola pria dan wanita yang diproyeksikan memperkuat tim nasional Indonesia. Widodo mengungkapkan, saat ini ada 4 (empat) atlet yang sedang dalam proses naturalisasi yang diajukan oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).

Terkait Strategi Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), Widodo menuturkan, saat ini Ditjen AHU sedang merapikan data Beneficial Owner (BO) dan pengawasan kepada notaris. Ditjen AHU juga dalam rencana pemberian amnesti bagi narapidana tertentu demi alasan kemanusiaan kecuali narapidana kasus korupsi.

Lebih lanjut Widodo juga menegaskan, dalam mendukung arahan Presiden melalui Inpres No. 9 Tahun 2025, Ditjen AHU turut mempercepat pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Hingga 20 Mei 2025, tercatat lebih dari 17.000 pengajuan nama Koperasi Merah Putih telah masuk.

"Untuk mewujudkan Asta Cita ke-2 dan ke-6 Program Presiden Prabowo, Kementerian Hukum melalui Ditjen AHU akan terus mengawal dan berkoordinasi dengan Kantor Wilayah untuk pengesahan badan hukum Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih agar target 80.000 Koperasi Merah Putih bisa tercapai," tegas Widodo.

Secara terpisah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ditjen AHU dalam percepatan digitalisasi layanan hukum serta pembentukan Koperasi Merah Putih sebagaimana arahan Presiden. "Transformasi layanan hukum yang dicanangkan Ditjen AHU menjadi tonggak penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel. Kami di Kantor Wilayah siap mendukung sepenuhnya proses percepatan digitalisasi dan pengesahan badan hukum Koperasi Merah Putih, termasuk melalui sinergi aktif dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Inovasi ini tidak hanya memperkuat pelayanan hukum, tetapi juga menjadi kontribusi nyata dalam pemberdayaan ekonomi desa dan kelurahan," ujar Nuryanti.

Harmonisasi Bersama Pemda Tapin: Bahas Ranperbup Inovasi Daerah

Banjarmasin, Humas_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menggelar rapat harmonisasi bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) tentang Inovasi Daerah. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah, Kamis (22/05).

Rapat dipimpin oleh Perancang Perundang-Undangan Ahli Madya, Bahjatul Mardhiah, serta dihadiri oleh jajaran Perancang Perundang-undangan Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Selatan dan perwakilan dari Pemkab Tapin.

Dalam sambutannya, Bahjatul Mardhiah menyampaikan bahwa proses harmonisasi memiliki peran penting untuk menyelaraskan substansi dalam rancangan peraturan daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi agar tidak terjadi pertentangan norma hukum.

“Melalui harmonisasi ini, diharapkan substansi Ranperbup Inovasi Daerah dapat menjadi dasar hukum yang kuat, jelas, dan tidak bertentangan dengan peraturan yang sudah ada,” ujarnya.

Selain itu, para perancang memberikan saran dan masukan teknis terhadap isi dari Ranperbup yang diajukan, baik dari aspek legal drafting maupun muatan substansi. Salah satu poin penting yang disampaikan oleh Bahjatul adalah perlunya fasilitasi dari pemerintah daerah dalam mendorong pelaksanaan inovasi, termasuk mendukung pendaftaran kekayaan intelektual sebagai bentuk perlindungan terhadap hasil inovasi daerah.

Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Selatan dalam mendukung pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas, aplikatif, serta berkontribusi terhadap kemajuan daerah.

Kemenkum Kalsel Ikuti Kegiatan Penelaahan Kebutuhan Belanja Pegawai TA 2025

Jakarta, Humas_Info — Dalam rangka optimalisasi perencanaan dan pelaksanaan anggaran, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti kegiatan Penelaahan Kebutuhan Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan oleh Bagian Pelaksana Anggaran Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum, pada Rabu (21/05/2025).

Turut hadir dalam kegiatan ini dua pelaksana dari Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenkum Kalsel, Yansurullah selaku Penyusun Program dan Arief Sutriaman selaku Penyusun Laporan Keuangan yang bersama dengan tim Biro Keuangan melakukan penelaahan mendalam terhadap kebutuhan anggaran belanja pegawai.

Pada sesi penelaahan, disampaikan bahwa pagu belanja pegawai TA 2025 untuk Kanwil Kemenkum Kalsel sebesar Rp. 9.101.844.000. Hingga bulan Mei 2025 (termasuk pembayaran gaji bulan Juni), realisasi anggaran telah mencapai Rp. 4.330.533.373. Adapun estimasi kebutuhan anggaran untuk bulan Juli hingga Desember 2025 sebesar Rp. 3.704.704.106. Estimasi ini sudah memperhitungkan tambahan 31 orang CPNS yang mulai aktif per Juni, kenaikan pangkat untuk 3 orang pegawai, dan kenaikan gaji berkala untuk 22 orang pada bulan Desember.

Dari hasil penelaahan tersebut, terdapat kelebihan anggaran belanja pegawai sebesar Rp. 667.240.000. Rencananya, kelebihan ini akan ditarik kembali oleh Biro Keuangan melalui mekanisme revisi anggaran yang dijadwalkan pada 28 Mei 2025. Selama proses revisi berlangsung, Kanwil Kemenkum Kalsel (DIPA Setjen) tidak diperkenankan melakukan revisi baik terhadap POK maupun DIPA hingga proses tersebut selesai.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi pembukaan resmi, diawali dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Mars Kementerian Hukum. Laporan kegiatan disampaikan oleh Ibu Dwi Nurlaely selaku Analis Anggaran Ahli Muda pada Biro Keuangan, yang kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Biro Keuangan, Ibu Sri Yusfini Yusuf.

Sebagai penutup kegiatan, dilakukan penyerahan Berita Acara hasil penelaahan kebutuhan belanja pegawai, yang menjadi dasar tindak lanjut kebijakan keuangan pegawai di lingkungan Kementerian Hukum, termasuk untuk wilayah Kalimantan Selatan.

Dorong Legalitas Usaha UMKM, Kemenkum Kalsel Gelar Sosialisasi dan Pendampingan Perseroan Perorangan di Kabupaten Balangan

Balangan, Humas_Info – Guna meningkatkan kesadaran pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) akan pentingnya legalitas usaha, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Divisi Pelayanan Hukum menggelar kegiatan "Sosialisasi dan Pendampingan Pendaftaran Perseroan Perorangan" di Kabupaten Balangan pada Kamis (22/05). Acara ini berlangsung di Aula Dinas Prindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan dan secara resmi dibuka oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah.

Dalam sambutannya, Meidy menekankan pentingnya legalitas bagi pelaku UMKM agar dapat mengembangkan usaha dengan lebih profesional dan terlindungi secara hukum. Ia juga menyampaikan bahwa hingga April 2025, Kalimantan Selatan telah mencatatkan 3.000 pendaftaran Perseroan Perorangan, termasuk 47 dari Kabupaten Balangan.

“Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, kami berharap para pelaku usaha di Kabupaten Balangan dapat memahami pentingnya legalitas usaha, serta memanfaatkan bentuk Perseroan Perorangan sebagai alternatif pendirian usaha yang mudah, cepat, dan terjangkau,” ungkap Meidy Firmansyah dalam sambutannya.

Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber utama. Narasumber pertama, Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU), Dewi Woro Lestari, yang menyampaikan secara komprehensif mengenai konsep dan pentingnya pendirian Perseroan Perorangan.

Sementara itu, Endah Sulistiorini, seorang praktisi usaha sekaligus pemilik PT Firayuri Sumber Rezeki yang bergerak di bidang kuliner, membagikan pengalamannya dalam mendirikan dan mengelola Perseroan Perorangan. Endah menyampaikan betapa pentingnya legalitas untuk memperluas pasar dan memperkuat kredibilitas di mata konsumen dan mitra bisnis.

Kegiatan ini diikuti oleh 30 peserta UMKM dari berbagai kecamatan di Kabupaten Balangan. Selain sesi sosialisasi, kegiatan juga diisi dengan pendampingan langsung untuk membantu peserta yang ingin melakukan pendaftaran Perseroan Perorangan melalui sistem online.

Pada sesi pendampingan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti menyapa para peserta dengan harapan para peserta mendaftar perseroan perorangan dan mendapatkan manfaat dalam mengembangkan usaha yang saat ini sedang digeluti.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan semakin banyak pelaku usaha di daerah yang terdorong untuk segera melegalkan usahanya dan naik kelas menuju UMKM yang mandiri dan kompetitif.

DWP Kanwil Kemenkum Kalsel Gelar Pertemuan Rutin dan Penyuluhan Hukum "Perempuan Berdaya, Bebas dari Kekerasan"

Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) telah mengumumkan pemanggilan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk mulai bekerja. Informasi ini termuat dalam pengumuman Kementerian Hukum Nomor SEK-KP.02.01-517 tanggal 20 Mei 2025 yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kemenkum, Nico Afinta.

Nico mengatakan bahwa pelaksanaan tugas sebagai CPNS Kemenkum terhitung sejak 1 Juni 2025, namun karena tanggal itu adalah hari libur, maka mereka baru akan memulai aktivitas di tanggal 2 Juni.

Pelaksanaan tugas akan diawali dengan kegiatan orientasi pada 2 Juni mendatang sesuai lokasi penempatan. CPNS yang ditempatkan di unit pusat melaksanakan orientasi di Graha Pengayoman Jakarta, sedangkan CPNS yang ditempatkan di kantor wilayah mengikuti kegiatan tersebut di kantor wilayah masing-masing.

"Karena tanggal 1 Juni itu hari libur, maka pelaksanaan tugas dimulai tanggal 2 Juni. Mereka wajib lapor diri dan langsung memulai orientasi sesuai lokasi masing-masing," kata Nico, Selasa (20/5/2025) dari ruang kerjanya.

Menurut pengumuman pemanggilan CPNS itu, semua peserta wajib mengenakan pakaian rapi dan sopan, yaitu kemeja putih polos tanpa corak, celana panjang hitam bagi laki-laki, rok hitam bagi perempuan, sepatu pantofel, dan hijab hitam polos bagi mereka yang berhijab.

Sementara itu, CPNS yang tidak dapat mengikuti kegiatan sejak tanggal 2 Juni karena sakit wajib menyertakan surat keterangan dari Rumah Sakit.

Nico mengingatkan CPNS untuk terus memantau informasi terbaru di laman resmi dan akun media sosial resmi Kemenkum. Ia mengimbau para peserta untuk tidak percaya pada informasi-informasi yang beredar dari sumber tidak resmi.

"Seluruh informasi pasti kami umumkan hanya melalui situs dan akun resmi. Jangan sampai adik-adik CPNS dirugikan oleh sumber-sumber yang tidak terpercaya," ujar Nico.

Nico juga menjelaskan bahwa seleksi CPNS Tahun Anggaran 2024 dilakukan saat kementerian masih belum terpisah menjadi tiga (masih Kementerian Hukum dan HAM). Namun, untuk pemanggilan peserta dan orientasi CPNS dilakukan oleh kementerian masing-masing, yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"CPNS sudah kami bagi untuk tiga kementerian. Yang kami umumkan hanyalah Kementerian Hukum. Yang lainnya diatur oleh Kementerian HAM serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan," tutup Nico.

Secara terpisah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti, menyambut baik pemanggilan CPNS Tahun Anggaran 2024 yang akan mulai melaksanakan tugas pada 2 Juni 2025 mendatang. Ia menegaskan bahwa jajaran Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan telah menyiapkan pelaksanaan orientasi dengan matang agar para CPNS dapat langsung beradaptasi dengan lingkungan kerja dan memahami peran strategis mereka dalam menjalankan tugas pemerintahan di bidang hukum.

"Kami sangat antusias menyambut generasi baru Aparatur Sipil Negara ini. Mereka adalah aset penting dalam memperkuat pelayanan publik dan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum," ujar Nuryanti. Ia juga mengingatkan seluruh CPNS agar menjunjung tinggi integritas serta terus memperbarui informasi hanya melalui kanal resmi Kemenkum untuk menghindari informasi keliru dari sumber tidak terpercaya.

Yang Ditunggu-tunggu, CPNS Kemenkum Mulai Kerja 2 Juni 2025

Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) telah mengumumkan pemanggilan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk mulai bekerja. Informasi ini termuat dalam pengumuman Kementerian Hukum Nomor SEK-KP.02.01-517 tanggal 20 Mei 2025 yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kemenkum, Nico Afinta.

Nico mengatakan bahwa pelaksanaan tugas sebagai CPNS Kemenkum terhitung sejak 1 Juni 2025, namun karena tanggal itu adalah hari libur, maka mereka baru akan memulai aktivitas di tanggal 2 Juni. Pelaksanaan tugas akan diawali dengan kegiatan orientasi pada 2 Juni mendatang sesuai lokasi penempatan. CPNS yang ditempatkan di unit pusat melaksanakan orientasi di Graha Pengayoman Jakarta, sedangkan CPNS yang ditempatkan di kantor wilayah mengikuti kegiatan tersebut di kantor wilayah masing-masing.

“Karena tanggal 1 Juni itu hari libur, maka pelaksanaan tugas dimulai tanggal 2 Juni. Mereka wajib lapor diri dan langsung memulai orientasi sesuai lokasi masing-masing,” kata Nico, Selasa (20/5/2025) dari ruang kerjanya.

Menurut pengumuman pemanggilan CPNS itu, semua peserta wajib mengenakan pakaian rapi dan sopan, yaitu kemeja putih polos tanpa corak, celana panjang hitam bagi laki-laki, rok hitam bagi perempuan, sepatu pantofel, dan hijab hitam polos bagi mereka yang berhijab. Sementara itu, CPNS yang tidak dapat mengikuti kegiatan sejak tanggal 2 Juni karena sakit wajib menyertakan surat keterangan dari Rumah Sakit.

Nico mengingatkan CPNS untuk terus memantau informasi terbaru di laman resmi dan akun media sosial resmi Kemenkum. Ia mengimbau para peserta untuk tidak percaya pada informasi-informasi yang beredar dari sumber tidak resmi.

“Seluruh informasi pasti kami umumkan hanya melalui situs dan akun resmi. Jangan sampai adik-adik CPNS dirugikan oleh sumber-sumber yang tidak terpercaya,” ujar Nico.

Nico juga menjelaskan bahwa seleksi CPNS Tahun Anggaran 2024 dilakukan saat kementerian masih belum terpisah menjadi tiga (masih Kementerian Hukum dan HAM). Namun, untuk pemanggilan peserta dan orientasi CPNS dilakukan oleh kementerian masing-masing, yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

“CPNS sudah kami bagi untuk tiga kementerian. Yang kami umumkan hanyalah Kementerian Hukum. Yang lainnya diatur oleh Kementerian HAM serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan,” tutup Nico.

Secara terpisah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti, menyambut baik pemanggilan CPNS Tahun Anggaran 2024 yang akan mulai melaksanakan tugas pada 2 Juni 2025 mendatang. Ia menegaskan bahwa jajaran Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan telah menyiapkan pelaksanaan orientasi dengan matang agar para CPNS dapat langsung beradaptasi dengan lingkungan kerja dan memahami peran strategis mereka dalam menjalankan tugas pemerintahan di bidang hukum.

“Kami sangat antusias menyambut generasi baru Aparatur Sipil Negara ini. Mereka adalah aset penting dalam memperkuat pelayanan publik dan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum,” ujar Nuryanti. Ia juga mengingatkan seluruh CPNS agar menjunjung tinggi integritas serta terus memperbarui informasi hanya melalui kanal resmi Kemenkum untuk menghindari informasi keliru dari sumber tidak terpercaya.

Sinergi dan Kolaborasi Nyata untuk UMKM: Kemenkum Kalsel dan Diskopumnaker Banjarbaru Fasilitasi 30 Sertifikasi Merek di Kota Banjarbaru

Banjarbaru, KI_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual terus memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung pelaku usaha mikro. Bersama Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja (Diskopumnaker) Kota Banjarbaru, kegiatan pendampingan sertifikasi dan sosialisasi pendaftaran merek digelar di Aula PLUT-KUMKM Banjarbaru, dengan melibatkan 30 pelaku UMKM setempat pada Kamis, (22/05).

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap pentingnya perlindungan merek sebagai identitas sekaligus aset hukum yang strategis. Dalam sambutannya, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Riswandi menegaskan bahwa merek bukan hanya simbol atau nama, melainkan bentuk pengakuan hukum yang dapat memperkuat posisi produk unggulan daerah di pasar.

“Pendaftaran merek bukan sekadar logo atau nama, tetapi bentuk pengakuan resmi yang memberi nilai tambah dan keamanan hukum bagi pelaku UMKM,” ujarnya.

Pada sesi materi, peserta dibimbing secara menyeluruh mulai dari identifikasi produk unggulan berbasis kandungan lokal dan inovasi, penelusuran merek (trademark search), pengisian permohonan secara daring, hingga proses pembayaran dan pemantauan status pendaftaran. Ketua Tim Fasilitasi Layanan Kekayaan Intelektual turut menjelaskan praktik terbaik dalam penyusunan dokumen agar proses sertifikasi berjalan lancar dan sesuai ketentuan administratif.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Sekretaris Diskopumnaker Kota Banjarbaru, Edy Rosadi, serta Kepala Bidang Usaha Mikro, Wieke Damayanti, yang memberikan dukungan langsung kepada para peserta.

“Kami bangga dapat mendampingi UMKM Banjarbaru dalam proses sertifikasi merek. Harapannya, ini dapat mendorong pertumbuhan usaha serta membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk lokal,” ungkap Edy Rosadi.

Melalui kolaborasi strategis ini, 30 pelaku UMKM Banjarbaru mendapatkan bekal pengetahuan dan pendampingan teknis yang esensial untuk menjaga dan mengoptimalkan hak kekayaan intelektual atas produknya. Langkah ini menjadi bagian dari upaya nyata mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di daerah serta meningkatkan daya saing menuju pengakuan yang lebih luas.

Dorong Partisipasi Publik, Penyusunan DIM RUU KUHAP Jaring Masukan dari Tenaga Ahli

Jakarta - Partisipasi publik dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHAP) memiliki peran yang strategis untuk memastikan bahwa rancangan peraturan tersebut benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DJPP) Kementerian Hukum melibatkan unsur tenaga ahli dalam menyusun rancangan peraturan ini.

Direktur Jenderal (Dirjen) Peraturan Perundang-undangan, Dhahana Putra mengatakan masukan yang diperoleh dalam forum ini nantinya akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam penyempurnaan substansi RUU KUHAP.

“Kegiatan ini merupakan bagian dari partisipasi publik dalam penyusunan RUU KUHAP yang bertujuan untuk mendengarkan masukan ataupun tanggapan secara komprehensif dalam rangka penyempurnaan terhadap RUU KUHAP,” ujar Dhahana dalam Rapat Koordinasi dan Penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU KUHAP.

Dhahana mengungkapkan proses penyusunan RUU KUHAP ini tidak hanya menjadi tugas pemerintah dan legislatif semata, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa dalam membangun sistem peradilan pidana yang lebih baik di masa depan.

“Melalui forum ini, pemerintah membuka ruang dialog guna menjaring berbagai perspektif, masukan, serta kritik konstruktif dari akademisi, praktisi hukum, advokat,” ujarnya di Jakarta, Rabu (21/05/2025) siang.

Selain itu, Asep Nana Mulyana, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung (Kejagung) mengatakan dalam penyusunan RUU KUHAP juga dilakukan diskusi dengan Kepolisan, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung.

“Pada forum ini kami ingin mendengarkan masukan-masukan yang mungkin luput, jadi butuh perbaikan. (Forum) ini sifatnya mendengarkan masukan yang nanti bisa dibahas lebih lanjut,” jelasnya.

Sementara itu Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Mashudi yang juga hadir dalam kegiatan ini mengatakan diperlukan checks and balances dalam pelaksanaan kewenangan masing-masing aparat penegak hukum, karena dikhawatirkan ada potensi penyalahgunaan kewenangan.

“Hal ini sangat penting ke depan, karena (fungsi) pemasyarakatan itu meliputi pelayanan, pembinaan, pembimbingan, perawatan, pengamanan dan pengamatan, sehingga nanti ada sinergi dalam penyusunan RUU KUHAP,” kata Mashudi.

Pembaruan hukum acara pidana dimaksudkan untuk menciptakan supremasi hukum agar lebih menjamin hak tersangka, terdakwa, terpidana, saksi, dan korban tindak pidana, serta menuju pada sistem peradilan pidana terpadu yang memperkuat tugas, fungsi dan wewenang aparat penegak hukum yang selaras dengan perkembangan ketatanegaraan, kemajuan teknologi informasi, dan konvensi internasional yang telah diratifikasi.

Rapat ini dihadiri oleh unsur pemerintah yang terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Imigrasi dan Pemasyarakatan; Kementerian Hukum; Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; perwakilan dari advokat; tenaga ahli dari universitas dan ICJR.

Secara terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti mendukung langkah Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dalam membuka ruang partisipasi publik secara luas dalam penyusunan DIM RUU KUHAP.

"Keterlibatan tenaga ahli dan berbagai pemangku kepentingan mencerminkan semangat transparansi dan inklusivitas dalam pembentukan hukum nasional. Harapan kami, pembaruan hukum acara pidana ini akan memperkuat keadilan substantif dan memastikan perlindungan hak-hak setiap warga negara dalam proses hukum," ungkap Nuryanti.

Monev Penguatan Layanan Hukum, Kanwil Kemenkum Kalsel Tinjau Posbankum Desa Kapar

Tabalong, Humas_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) atas pendirian dan pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Desa Kapar, Kabupaten Tabalong pada Kamis (22/05). Sebagai lokasi pertama, kegiatan ini juga dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Nuryanti Widyastuti, didampingi oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana, serta Tim Penyuluh Hukum dari Kantor Wilayah.

Kegiatan ini merupakan wujud komitmen Kanwil dalam memastikan keberlanjutan layanan Posbankum sebagai bagian dari perluasan akses keadilan dan penyelesaian konflik hukum di tingkat desa. Kabupaten Tabalong dipilih sebagai lokasi kegiatan mengingat peran aktif dalam Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PJA) sejak 2023, serta pelaksanaan pelatihan paralegal dan pembentukan Posbankum di berbagai desa/kelurahan. Kepala Kantor Wilayah menegaskan bahwa Posbankum harus menjadi ruang yang mudah dijangkau oleh masyarakat untuk mendapat bantuan hukum, penyelesaian sengketa, hingga peningkatan kesadaran hukum.

Kepala Kantor Wilayah, Nuryanti Widyastuti, menyampaikan apresiasi atas peran Desa Kapar.

"Posbankum di Desa Kapar menunjukkan bahwa akses keadilan bisa dimulai dari desa. Saya apresiasi komitmen Pemerintah Desa yang proaktif melayani masyarakat secara hukum sejak awal," ucapya.

Kepala Desa Kapar, Saipul Rahman, mengungkapkan bahwa sejak Posbankum terbentuk, berbagai persoalan hukum di desa telah berhasil ditangani, seperti kasus perceraian, peredaran narkoba, hingga permasalahan sosial yang berpotensi mengganggu ketertiban desa.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah bersama Kepala Divisi P3H memberikan penguatan kepada Camat, Kepala Desa, dan kelompok Kadarkum terkait prinsip-prinsip penyelesaian hukum yang harus diperhatikan oleh Posbankum. Kegiatan ditutup dengan peninjauan langsung ke Posbankum dan Perpustakaan Desa sebagai bentuk inovasi pelayanan masyarakat, serta diskusi interaktif bersama kelompok Kadarkum Desa Kapar.

Kanwil Kemenkum Kalsel Laksanakan Monev Posbankum di Kelurahan Belimbing Raya

Tabalong, Humas_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap pendirian dan pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Kelurahan Belimbing Raya, Kabupaten Tabalong, pada Kamis (22/05). Kegiatan ini masih dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Nuryanti Widyastuti, didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana, serta Tim Penyuluh Hukum Kanwil.

Kegiatan Monev di lokasi kedua ini (sebelumnya di Desa Kapar) juga bertujuan untuk memastikan perluasan akses keadilan bagi masyarakat benar-benar berjalan melalui keberadaan Posbankum hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Kelurahan Belimbing Raya dipilih karena dinilai aktif dalam menyelesaikan persoalan hukum di tingkat masyarakat dan menjadi salah satu peserta dengan nilai terbaik dalam seleksi Peacemaker Justice Award Tahun 2025.

Dalam arahannya, Kepala Kantor Wilayah menyampaikan gambaran besar program pembentukan Posbankum serta rencana pelaksanaan Peacemaker Training dan kegiatan Paralegal Serentak yang akan memperkuat keberadaan Posbankum di tingkat kelurahan.

“Saya sangat mengapresiasi Lurah Belimbing Raya yang telah menjalankan peran penting dalam penyelesaian persoalan hukum masyarakat bahkan sebelum seluruh rangkaian kegiatan Peacemaker Justice Award selesai dijalani,” ujar Nuryanti.

Lurah Belimbing Raya, Dimas Satrio Aji, menyampaikan bahwa ia bersama aparatur kelurahan aktif menangani persoalan hukum warganya, terutama melalui mediasi. Beberapa kasus rumah tangga dan tindak pidana umum berhasil diselesaikan secara damai tanpa harus sampai ke ranah kepolisian. Kegiatan ini ditutup dengan peninjauan langsung ke Posbankum yang berada di Kantor Kelurahan dan sesi diskusi bersama masyarakat sebagai bentuk komitmen Kanwil Kemenkum Kalsel dalam mendorong layanan hukum yang inklusif dan solutif.

Jalankan Program Unggulan AKRAB : Kemenkum Kalsel Lakukan Penguatan Layanan Posbankum di Desa Balida dan Pastikan Akses Layanan Hukum di Tingkat Desa

Balangan, Humas_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melaksanakan kegiatan monitoring dan penguatan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Desa Balida, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan pada Kamis (22/05). Kegiatan yang merupakan bagian program AKRAB (Aksi Kanwil Kemenkum Kalsel Bagawi) dilaksanakan guna mendekatkan layanan Kanwil Kemenkum Kalsel di tengah masyarakat dengan terjun langsung ke lapangan.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Nuryanti Widyastuti, didampingi oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana, serta tim Penyuluh Hukum dari Kantor Wilayah.

Kunjungan ini juga merupakan bagian dari tindak lanjut atas kontribusi aktif Kepala Desa Balida, Sahridin, yang merupakan Alumni Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PJA) Tahun 2024 dan penerima penghargaan NLP. Desa Balida juga telah mengirimkan satu orang anggota Kadarkum dan Posbankumnya untuk mengikuti pelatihan Paralegal Terlatih Angkatan I (Parletak I) yang baru saja selesai pada 21 Mei lalu.

Kegiatan monitoring dilakukan untuk memastikan seluruh fungsi layanan Posbankum seperti penyediaan informasi hukum, mediasi, negosiasi, serta pendampingan litigasi dan non litigasi berjalan dengan baik.

Dari hasil monitoring, diketahui bahwa Posbankum Desa Balida telah berfungsi secara optimal. Kepala Desa Sahridin menyampaikan bahwa keberadaan anggota Posbankum yang telah mengikuti pelatihan paralegal sangat membantu dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum masyarakat melalui pendekatan mediasi dan negosiasi. Beberapa persoalan seperti sengketa tanah, warisan, hingga konflik antar warga berhasil diselesaikan secara damai tanpa melalui jalur peradilan.

Kepala Kantor Wilayah, Nuryanti Widyastuti, mengapresiasi capaian tersebut.

"Saya sangat mengapresiasi keberadaan Posbankum Desa Balida yang telah membantu masyarakat menyelesaikan persoalan hukum secara damai. Ini bukti bahwa akses terhadap keadilan bisa dimulai dari tingkat desa," ujarnya.

Sebagai tindak lanjut program AKRAB, Kakanwil juga mendorong percepatan pendirian Koperasi Merah Putih melalui notaris yang telah ditunjuk. Selain itu, rombongan turut melakukan peninjauan ke destinasi wisata alam Desa Balida yang rutin melaksanakan berbagai kegiatan dan telah mengukir prestasi di sejumlah lomba desa tingkat kabupaten.

Program AKRAB Kemenkum Kalsel Sukses Bantu UMKM Balangan Dirikan Perseroan Perorangan

Balangan, Humas_Info - Di tengah upaya meningkatkan pelayanan hukum yang lebih dekat dan berdampak langsung kepada masyarakat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kemenkum Kalsel) kembali menghadirkan gebrakan melalui program unggulan AKRAB (Aksi Kanwil Kemenkum Kalsel Bagawi). Program ini menjadi salah satu motor penggerak untuk memberikan layanan publik yang cepat mudah diakses, dengan turun langsung ke lapangan.

Salah satu kegiatan nyata dari program AKRAB ini digelar pada Kamis (22/05), di Aula Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan. Bertajuk Sosialisasi dan Pendampingan Pendaftaran Perseroan Perorangan, kegiatan ini diikuti oleh 30 pelaku UMKM dari berbagai penjuru Balangan yang antusias untuk mengetahui cara mendirikan usaha berbadan hukum secara mandiri.

Kegiatan yang diinisiasi oleh Divisi Pelayanan Hukum ini berhasil menarik perhatian 30 pelaku UMKM dari berbagai kecamatan di Kabupaten Balangan. Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya legalitas usaha sebagai fondasi menuju UMKM yang profesional, terlindungi secara hukum, dan mampu berkembang lebih jauh.

"Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, kami berharap para pelaku usaha di Kabupaten Balangan dapat memahami pentingnya legalitas usaha, serta memanfaatkan bentuk Perseroan Perorangan sebagai alternatif pendirian usaha yang mudah, cepat, dan terjangkau," ujar Meidy

Selama kegiatan berlangsung, peserta tidak hanya menerima materi, tetapi juga mendapatkan pendampingan langsung dalam proses pendaftaran badan usaha secara online. Narasumber dari internal dan eksternal dihadirkan untuk memperkaya wawasan peserta. Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU), Dewi Woro Lestari, menyampaikan materi mengenai pentingnya badan hukum bagi UMKM, sementara Endah Sulistiorini, pemilik PT Firayuri Sumber Rezeki, berbagi pengalamannya dalam mendirikan dan mengelola Perseroan Perorangan di bidang kuliner.

Antusiasme peserta cukup tinggi. Dari kegiatan tersebut, empat peserta berhasil mendirikan Perseroan Perorangan hanya dalam dua hari. Dua di antaranya, Anita Permata dengan PT Kedai Anita Madu Meratus dan Abdul Hadi dengan PT Juragan Mandai Abadi, berhasil menyelesaikan pendirian usaha mereka pada hari pertama. Keesokan harinya, dua pelaku usaha lainnya, Sapnawati dengan PT Filafilo Berkah Jaya dan Masramia dengan PT Tiga Badangsanak Berkah, juga menyusul menyelesaikan pendaftaran dan pendirian badan hukum.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Nuryanti Widyastuti, turut hadir dalam sesi pendampingan menyampaikan harapannya agar para pelaku usaha di Balangan semakin menyadari pentingnya memiliki badan hukum, sehingga mampu bersaing dan berkembang lebih jauh di tengah tantangan pasar.

Keberhasilan kegiatan ini menjadi cerminan nyata dari efektivitas Program AKRAB dalam menjangkau dan melayani masyarakat secara langsung. Dengan pendekatan yang kolaboratif dan praktis, Kemenkum Kalsel membuktikan bahwa urusan legalitas usaha tak lagi menjadi hal yang rumit bagi UMKM. Melalui pendampingan yang tepat, pelaku usaha di daerah kini memiliki akses yang lebih mudah untuk menjadi bagian dari ekosistem bisnis yang sah, terpercaya, dan kompetitif.

Tren Positif Permohonan KI dan AHU: Merek, Hak Cipta hingga Koperasi Merah Putih

Jakarta - Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mengatakan tren permohonan Kekayaan Intelektual (KI) dan Administrasi Hukum Umum (AHU) mengalami peningkatan di tahun 2025.

Di bidang KI, pada periode Januari - April 2025 Kemenkum berhasil menyelesaikan 123.933 permohonan KI. Kinerja ini naik sebesar 70,87% jika dibandingkan dengan Januari - April 2024 sebanyak 72.530 penyelesaian permohonan. “Di tengah efisiensi anggaran, Kemenkum tetap menunjukkan kinerja yang impresif. Pada kuartal pertama 2025, penyelesaian permohonan melonjak 70,87% dibandingkan periode yang sama tahun 2024,” ujar Supratman, Sabtu (24/5/2025).

Ia menjelaskan sumbangsih terbesar capaian tersebut bersumber dari penyelesaian merek dan hak cipta. Penyelesaian merek meningkat dari 31.791 menjadi 73.074 atau sebesar 129,86%. Sedangkan penyelesaian hak cipta melalui layanan Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta (POP HC) naik dari 34.241 menjadi 43.491 atau sebesar 27%. Di samping itu, jumlah permohonan yang diberikan oleh masyarakat juga meningkat. Pada kuartal pertama tahun ini, total permohonan hak cipta, merek, paten, desain industri, rahasia dagang, indikasi geografis, serta desain tata letak sirkuit terpadu mencapai 88.893. Angka ini naik sebesar 15,29% dari kuartal pertama 2024 sebanyak 77.099.

“Kenaikan pada jumlah permohonan KI dari masyarakat, juga jumlah permohonan yang berhasil diselesaikan oleh jajaran Kemenkum, dipengaruhi oleh transformasi digital yang mempercepat keseluruhan proses pelayanan,” ungkapnya.

Sementara itu di bidang AHU, lanjut Supratman, transformasi digital telah mempercepat proses pendaftaran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang menjadi salah satu program Presiden Prabowo Subianto. Kemenkum mencatat bahwa hingga 20 Mei 2025 sudah lebih dari 17.000 pengajuan nama Koperasi Merah Putih yang masuk.

“Untuk mewujudkan Asta Cita ke-2 dan ke-6 Program Presiden Prabowo, Kementerian Hukum akan terus mengawal dan berkoordinasi untuk mempercepat pengesahan Badan Hukum Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, agar target 80.000 Koperasi Merah Putih bisa tercapai,” kata Menteri kelahiran Sulawesi ini.

Seluruh data capaian kinerja kuartal I Kemenkum di bidang KI dan AHU telah disampaikan secara terbuka pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XIII pada Rabu (21/5/2025) lalu. Dalam RDP tersebut, anggota komisi XIII DPR RI dari partai Gerindra, Melati, mendukung jajaran Kemenkum agar terus memberikan kemudahan bagi masyarakat misalnya melalui subsidi terhadap setiap permohonan KI bagi pelaku UMKM. Anggota Komisi XIII lainnya, Sohibul Iman dari PKS, mengapresiasi kinerja positif Kemenkum di bidang kekayaan intelektual. Menurutnya, Kemenkum telah meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan KI.

Secara terpisah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti menyambut baik tren positif peningkatan permohonan Kekayaan Intelektual (KI) dan Administrasi Hukum Umum (AHU) sebagaimana disampaikan oleh Bapak Menteri.

"Capaian ini mencerminkan hasil nyata dari transformasi digital yang telah diimplementasikan secara menyeluruh, termasuk di wilayah Kalimantan Selatan. Dengan adanya percepatan layanan, khususnya dalam pencatatan merek dan hak cipta, kami melihat antusiasme masyarakat, pelaku UMKM, hingga akademisi semakin tinggi dalam melindungi karya dan inovasi. Kami akan terus memperkuat sosialisasi serta pendampingan hukum agar lebih banyak lagi masyarakat memanfaatkan fasilitas ini, termasuk dalam mendukung percepatan pengesahan Koperasi Merah Putih sebagai bagian dari kontribusi daerah terhadap realisasi program strategis nasional," ungkapnya.

PENGAYOMAN

KEMENTERIAN HUKUM
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN SELATAN

#bangga melayani bangsa